

## WALI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

## PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 23 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

#### GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA TERNATE

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALI KOTA TERNATE,

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- b. bahwa untuk perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan secara berdaya guna dan berhasil guna, dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai peran penting dalam Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Ternate;

#### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
- 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 186);
- 10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 122);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA TERNATE.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Ternate.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ternate
- 3. Wali Kota adalah Kota Ternate
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
- 6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan umum 25 Tahun dibidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam *road map* Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
- 7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, dan mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
- 8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
- 9. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
- 10. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
- 11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- 12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
- 13. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

- 14. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
- 15. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
- 16. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu.
- 17. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- 18. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- 19. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 20. Dokumen Kependududkan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
- 22. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
- 23. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan .
- 24. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
- 25. Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.
- 26. Road map merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* selama 5 Tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih tahap lainnya, Roadmap bersifat living dokumen dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri/Kepala Lembaga pada tingkat nasional dan Kepala Daerah pada tingkat daerah agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

# BAB II GDPK

# Bagian Kesatu Penetapan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ditetapkan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Ternate.

# Bagian Kedua Arah Kebijakan

#### Pasal 3

- (1) Pembangunan kependudukan mengunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan
- (2) Pembangunan kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik ditingkat, daerah maupun masyarakat
- (3) Pembangunan kependudukan meniti beratkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan
- (4) Pembangunan pembanguna diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan
- (5) Pembangunan berkelanjutan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan pembangunan berencana jangka panjang nasional dan daerah.

# Bagian Ketiga Tujuan

## Pasal 4

#### (1) Tujuan umum:

- a. menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan; dan
- b. mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai kondisi sosial, budaya, ekonomi, daya dukung alam dan daya tamping lingkungan melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Ternate;

#### (2) Tujuan khusus:

- a. mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek Kesehatan, Pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan taqwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
- b. mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- c. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan;
- d. mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja;
- e. mewujudkan pengarahan mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan;
- f. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
- g. mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk; dan
- h. mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan;

## Bagian keempat Sistematika GDPK

#### Pasal 5

(1) Sistem GDPK ini meliputi:

a. BAB I : PENDAHULUAN

b. BAB II : ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

c. BAB III : PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL

KEPENDUDUKAN

d. BAB IV : VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

KEPENDUDUKAN DAERAH

e. BAB V : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

KEPENDUDUKAN

f. BAB VI : ROAD MAP GDPK

g. BAB VII : PENUTUP

(2) GDPK Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

## BAB III STRATEGI PELAKSANAAN GDPK

### Pasal 6

Strategi pelaksanaan GDPK disusun melalui 5 (lima) pilar sebagai berikut :

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan data dan administrasi kependudukan.

# BAB IV PELAKSANAAN GDPK

#### Pasal 7

- (1) Untuk mengendalikan kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dan pencapaian pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah melakukan :
  - a. Pengaturan fertilitas; dan
  - b. Penurunan mortalitas.
- (2) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program keluarga berencana.
- (3) Program keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pendewasaan usia perkawinan;
  - b. Pengaturan kehamilan yang diinginkan;
  - c. Pembinaan kesertaan keluarga berencana;
  - d. Peningkatan kesejahteraan keluarga;
  - e. Pengunaan obat, alat dan atau cara pengaturan kehamilan;
  - f. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan
  - g. Peningkata Pendidikan dan peran wanita.
- (4) pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil , bahagia dan sejahtera
- (5) penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
  - a. penurunan angka kematian ibu hamil;
  - b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
  - c. penurunan angka kematia pasca melahirkna; dan
  - d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

#### Pasal 8

- (1) untuk meningkatkan pasal kualitas penduduk sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, pemerintah daerah melakukan peningkatan kualitas penduduk dibidang Kesehatan, Pendidikan, Agama, Ekonomi dan Sosial Budaya.
- (2) Peningkatan kualitas penduduk dibidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan Kesehatan peningkatan peran pemerintah daerah dan swasta serta memperdayakan keluarga dan masyarakat;
  - b. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan peningkatan ketersediaan serta aksebilitas pangan penduduk; dan

- c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Peningkatan kualitas penduduk dibidang Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan akses penduduk terhadap Pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
  - b. peningkatan kompetensi penduduk melalui Pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
  - c. pengurangan kesenjangan Pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh akses Pendidikan.
- (4) Peningkatan kualitas penduduk dibidang ekonomi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. maningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
  - b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

#### Pasal 9

- (1) Untuk mewujdkan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c dan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni, pemerintah daerah melakukan:
  - a. pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah; dan
  - c. pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.
- (2) Pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekayasa sosial keluarga
- (3) Rekayasa sosial keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. penataan struktur keluarga;
  - b. penguatan relasi sosial keluarga;
  - c. pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
  - d. perluasan jaringan sosial keluarga.

#### Pasal 10

- (1) Untuk penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, pemerintah daerah melakukan:
  - a. pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
  - b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan daerah;
  - c. pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah; dan

- d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa.
- (2) Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi:
  - a. mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial ,ekonomi, budaya dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan
  - b. mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

#### Pasal 11

Untuk penetaan data dan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e pemerintah daerah melakukan:

- a. pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk instansi pemerintah terkait lainnya atau dikenal dengan konsep govvernment to government (G2G), layanan SAK untuk masyarakat atau dikenal dengan istilah untuk masyarakat atau dikenal dengan istilah government to citizen (G2C), layanan sistem administrasi sistem kependudukan (SAK) untuk dunia bisnis (G2B), dan pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK);
- b. pengembangan data base kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan marketing research, e-payment, e-commerce, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya;
- c. pemantapan fungsi dan peranan database kependudukan nasional yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan;
- d. pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai Lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada;
- e. pengembangan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari decision support system (DSS) yang terintegratif.

## BAB V TIM KOORDINASI

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK dibentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan dan menyinkronisasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi GDPK;
  - b. melakukan sinergi dengan berbagai kebijakan dari berbagai jenjang pemerintahan ,lintas urusan serta perangkat daerah; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.

#### Pasal 13

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas tim koordinasi dapat dibentuk kelompok kerja .
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kelompok kerja bidang pengendalian kuantitas penduduk;
  - b. Kelompok kerja bidang peningkatan kualitas penduduk;
  - c. Kelompok kerja bidang mobilitas penduduk;
  - d. Kelompok kerja bidang pembangunan keluarga; dan
  - e. Kelompok kerja bidang data base dan informasi kependudukan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

> Ditetapkan di Ternate Pada tanggal 28 April 2023

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Ditetapkan di Ternate pada tanggal 28 April 2023

## SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

**JUSUF SUNYA** 

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 530

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

> TOTO SUNARTO, S.H PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001



# GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA TERNATE (2020 -2026)

PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2022

SKPD BAG. HUKUM

## DAFTAR ISI

Hole	om	an Judul	i
KAT	A F	PENGANTAR	ii
KAT	A S	SAMBUTAN	iii
DAF	TA	R ISi	iv
DAF	TA	R GAMBAR	v
DAF	TA	R TABEL	.vi
DAF	TAI	R LAMPIRAN	vii
BAB	l.	PENDAHULUAN	1
A		Latar Belakang	1
B.		Dasar Hukum	4
C.		Tujuan Penyusunan GDPK	6
D.		Sasaran	7
E.		Pengertian	7
F.		Kedudukan GDPK	10
G		Ruang Lingkup	11
H.		Pendekatan pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan	12
1.		Sistematika	12
BAB	II.	analisis situasi kependudukan di k <mark>o</mark> ta ternate	
A.		Pengendalian Kuantitas Penduduk	14
	1)		17
	2)		20
	3)	Indikator TFR, GRR dan NRR	22
B.		Peningkatan Kualitas Penduduk	25
	1)		25
	2)	Indeks Pembangunan Manusia	28
	3)	Parameter Pendidikan	30
	4)	Tingkat Pengangguran Terbuka	33
C.		Pembangunan Keluarga	35
	1)	UKP	36
	2)	ASFR	3

SKPD	BAG. HUKUM
7	t

3)	Ketahanan Keluarga	9
4)	Program Keluarga Harapan	2
D.	Mobilitas Penduduk	44
E.	Data dan Informasi	46
BAB III.	PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN	50
A.	Data Parameter Kependudukan Kata Ternate	50
В.	Analisis Potensi serta Dampak	52
BAB IV.	VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH	60
A.	Visi	60
В.	Misi	60
C.	Tujuan	60
D.	Arah Kebijakan dan Strategi	60
1)		
2)		
E.	Program dan Kegiatan	62
BAB V.	KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH	
A.	Gambaran Singkat Kata Ternate	65
В.	Visi Kata Ternate	
C.	Misi Kata Ternate	
D.	Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Kata Ternate	
E.	Pertumbuhan Ekonomi Kata Ternate	
BAB VI	PETA JALAN (ROAD MAP)	
A.	Penahapan implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan	
В.	Program Prioritas	89
BAB VI	. PENUTUP	91
Α.	Kesimpulan	91
В.	Pokomondasi	91
LAMPIE	PAN	00

## DAFTAR GAM BAR

Gambar I. 1 Kedudukan GDPK dalam Sistem Perencanaan Pembangunan 11
Gambar II. 1 Sebaran Penduduk di Provinsi Maluku Utara tahun 2020
Gambar II. 2 Distribusi Persentase Penduduk di Kota Ternate Menurut Kecamatan tahun 2021
Gambar II. 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kota Ternate tahun 2016
s.d. 202129
Gambar II. 4 Kerangka Alur Pembentukan Variabel iBangga
Gambar II. 5 Perkembangan Migrasi di Kota Ternate
Gambar VI. I Keterkaitan Grand Design Kependudukan 2010 -2035 dengan Road Map 87

## DAFTAR TABEL

Tabel II 1 Keadaan Angka Partisipasi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kota Ternate
tahun 2020 34
Tabel    2 Kelompok Kegiatan Pembangunan Keluarga Di Kota Ternate Tahun 2021 40
Tabel III 1. SASARAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA TERNATE
TAHUN 2020 – 2026 51
Tabel V. 1. Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Ternate tahun 2020 67
Tabel V. 2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota
Ternate tahun 2016 – 2020 67
Tabel V. 3. Pertumbuhan Jumlah PDRB Kota Ternate 2016 – 2020 Berdasarkan Harga Konstan
2010 dan Harga Berlaku 84
Tabel VI. 1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Ternate Tahun 2021-2025

vii

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:	PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	KEPENDUDUKAN KOTA TERNATE TAHUN 2021•
	2026	93
Lampiran 2:	SK WALI KOTA TERNATE, TIM KO	Ordinasi GDPK97

viii

#### BAB I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada dasarnya Pembangunan suatu negara bersifat multi dimensional, karena berhubungan dengan proses perubahan pembangunan yang direncanakan, diupayakan dan diharapkan berhasil di banyak aspek seperti ekonomi, struktur sosial, pendidikan, infrastruktur, budaya hingga institusi. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan suatu wilayah akan menjadi kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup (levels of living) warga negaranya. Sehingga penyelarasan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan sektor lain diharapkan dapat memperbaiki Political Will dan komitmen pemerintah terhadap perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Sehubungan dengan uraian ini, maka komitmen Pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan berbagai upaya, yaitu: pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan esejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Implementasi dari upaya tersebut akan menjadikan penduduk sebagai sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, sehingga mampu bersaing dengan bangsa lain dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus mendapat perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam merancang pembangunan di suatu wilayah harus disesuaikan dengan isu strategis pembangunan. Sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Faktor yang menjadi perhatian dalam penera pan perencanaan pembangunan adalah Tata Ruang pembangunan wilayah memerlukan site plan

1

SKPD	BAG. HUKUM
7	A

atau perencanaan yang jelas apalagi daerah perkotaan, serta adanya dukungan kerangka Regulasi (PERWALI), disamping itu Urbanisasi dan Ketimpangan Wilayah juga merupakan faktor yang harus tersusun secara terencana dan sistematis, serta memiliki tolak ukur keberhasilan dan harus didukung dengan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan pembangunan suatu perkotaan. Dengan kata lain, dapat terlihat adanya kesinambungan dan keterkaitan pelaksanaan pembangunan yang implementasinya dapat dilaksanakan pada semua tingkatan wilayah.

Salah satu isu strategis yang perlu di kedepankan adalah isu pembangunan kependudukan. Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

Dan untuk mengakomodir isu pembangunan diatas, memerlukan suatu kerangka berfi kir yang logis yang ditruangkan dalam sustru dokjumen perencanaan pembangunan kependudukan atau lebih lazim disebut Grand Gesign Pembangunan Kependudukan (GDPK). Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. GDPK ini terdiri dari lima pilar pembangunan kependudukan, yaitu: (1) Pengendalian Kuantitas Penduduk, (2) Peningkatan Kualitas Penduduk, (3) Pengarahan Mobilitas Penduduk, (4) Pembangunan Keluarga, (5) Pengembangan Data Base Kependudukan.

Perlu disadari bahwa proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan. Oleh karena itu penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan dalam rangka menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan menjadi sangat urgen.

Hal ini untuk menciptakan harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan. Dengan tersusunnya Grand Design Pembangunan

Kependudukan, diharapkan dapat memperbaiki political will dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap kependudukan sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para policy makers terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan.

Pada konteks regional Kota Ternate berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang dirilis BPS Kota Ternate Tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk 205.001 jiwa dibandingkan tahun 2019 adalah sebesar 233,208 jiwa yang artinya terjadi penurunan sebesar -28.207 jiwa atau dengan laju pertumbuhan sebesar - 0,12 %. Begitu juga dengan tingkat kepadatan penduduk di Kota Ternate juga mengalami penurunan pada tahun 2019 rata-rata kepadatan penduduk sebesar 1.438 jiwa/Km2 menjadi 784,93 jiwa/Km2 atau turun dengan prosentase penurunan sebesar -0,28 %, sedangkan peningkatan jumlah penduduk terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 205.870 jiwa atau meningkat sebesar 869 jiwa (0,42 %). Kondisi ini menunjukan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk berdampak pada tingkat kepadatan penduduk.

Salah satu indikator dari pembangunan kualitas penduduk adalah pendidikan, karena pendidikan merupakan suatu proses dalam mengembangkan potensi diri untuk memiliki kepribadian yang cerdas, dan akhlak mulia, serta keterampilan (skill). Oleh karena itu pemerintah harus dapat menjamin pelayanan pendidikan bagi setiap warga negara, sebab kebijakan yang dirumuskan nantinya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui aspek pendidikan. Sampai dengan tahun 2021 Angka Melek Huruf di Kota Ternate adalah 99,65 %, hal ini berarti bahwa proporsi penduduk dengan usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis yang dibandingkan dengan penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kota Ternate sangat tinggi. Dimana Angka Melek Huruf merupakan tolok ukur untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang melek huruf, sehingga dapat diidentifikasi jumlah penduduk yang memiliki kemampuan dasar dalam memperoleh akses informasi ataupun memperluas informasi yang didapat, menambah pengetahuan dan keterampilan, dapat berkomunikasi, serta memiliki pemahaman yang baik sehingga penduduk dapat meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, masyarakat, dan negaranya di berbagai bidang kehidupan. Hal ini tidak terlepas dari aspek ketersediaan sarana prasarana dan mutu pendidikan telah menunjukan hasil yang cukup baik, hal ini dibarengi dengan terus

meningkatnya anggaran pendidikan yang melebihi target 20 % yaitu kisaran 30% anggaran pendidikan di Kota Ternate, kebijakan ini terus diupayakan untuk menjamin semua penduduk di Kota Ternate bebas dari buta huruf, semua penduduk usia sekolah dapat memanfaatkan sarana pendidikan yang telah disediakan, sehingga menjamin kualitas penduduk yang memadai dan mampu bersaing secara regional maupun global.

Disamping itu keterkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk yang diukur berdasarkan indikator kesejahteraan seperti tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat capaian kesehatan masyarakat, maka dapat ditentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan kesejahteraan penduduk dengan demikian Kota Terate pada tahun 2020 indikator capaian IPM sebesar 79, 82 % naik dari tahun 2019 yaitu sebesar 79,13 % dan sampai dengan tahun 2021 IPM Kota Ternate adalah sebesar 80,14 % dan merupakan IPM tertinggi di Maluku Utara.

## B. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Dasar 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, pasal 33, dan pasal 34);
- 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
   Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
- Perpres No. 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
- 12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor: 39 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 112);
- 14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
- 15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 210);
- 16. Peraturan Walikota Ternate No. 10 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 278);

## C. Tujuan Penyusunan GDPK

#### 1) Umum

- a. Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah Kota Ternate dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan;
- b. Mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Ternate;

#### 2) Khusus

- Mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan taqwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
- Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan;
- d. Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja;
- e. Mewujudkan pengarahan mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan;
- f. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
- g. Mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk;
- h. Mewujudkan data dan informasi kependudkan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan;

#### D. Sasaran

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan itu sendiri. Sasaran dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) adalah untuk mengintegrasikan berbagai parameter kependudukan melalui 5 (lima) Pilar yaitu 1) Pengendalian Kuantitas Penduduk, 2) Peningkatan Kualitas Penduduk, 3) Pembangunan Keluarga, 4) Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk, dan 5) Data dan Informasi Kependudukan.

## E. Pengertian

Beberapa batasan pengertian dalam panduan Grand Design Pembangunan Kependudukan ini, antara lain:

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 2. Asumsi Proyeksi adalah faktor penentu pertumbuhan penduduk di daerah mengikuti kecenderungan data atau kondisi yang diinginkan.
- Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
- 4. Diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok dengan informan yang memiliki karakteristik yang setara.
- 5. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam road map Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

- 6. Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan.
- 7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
- 8. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
- Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
- 10. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
- 11. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
- 12. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
- 13. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana disegala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
- 14. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.

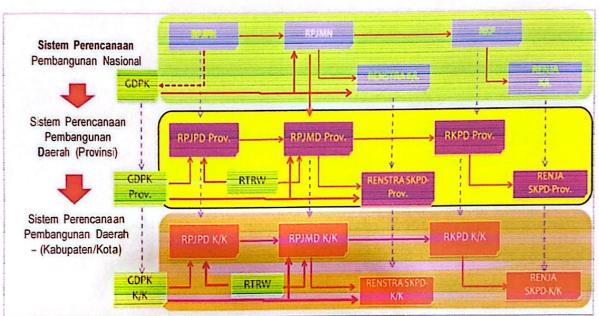
- 15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 16. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 17. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tamping lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- 18. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- 19. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 20. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- 21. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- 22. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebutdengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
- 23. Peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- 24. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.

- 25. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
- 26. Roadmap merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat living document dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga pada tingkat nasional dan Kepala Daerah pada tingkat daerah agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

#### F. Kedudukan GDPK

- Dengan tersusunnya GDPK, diharapkan dapat memperbaiki political will dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap prioritas pembangunan kependudukan, sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para policy makers terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan, sebagai suatu kesatuan yang saling berdialektika, berintegrasi, dan bersinergis dalam setiap langkah dan capaian-capaiannya.
- Pembangunan di suatu wilayah akan berhasil apabila memiliki penduduk yang menjadi modal dasar pembangunan, kondisinya kondusif dan konstruktif, tentunya tidak hanya dari sisi jumlahnya yang mencukupi struktur dan persebarannya yang menguntungkan, tetapi kualitasnya pun harus memadai.
- 3. Oleh karena itu Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan itu sendiri. Serta sebagai arah bagi kebijakan kependudukan dimasa depan harus sejalan dengan RPJMN yang kemudian dapat membantu penjabaran target-target dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.
- 4. Sehingga Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan

mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan rancangan induk pembangunan kependudukan yang diderivasi mengacu kepada RPJPN yang sudah dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, untuk menjadi acuan K/L serta Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan kependudukan, kedudukan Grand Design Pembangunan Kependudukan pada hakikatnya dapat menjadi acuan untuk RPJMN atau RPJMD (mengingat telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden), dan penajaman dari RPJPN.



Gambar I. 1 Kedudukan GDPK dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Sumber: Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar, BKKBN 2021

## G. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan ini mencakup:

 Membahas mengenai tahapan penyusunan, pemantauan dan pelaporan, pembiayaan serta pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar. 2. Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan ini berlaku bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan memanfaatkan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar serta dapat dijadikan acuan bagi masyarakat, lembaga non-pemerintahan, dan lembagalembaga terkait untuk berpartisipasi dalam penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.

## H. Pendekatan pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan

- Kegiatan ini disusun atas kerjasama lintas sektor dari berbagai SPKD yang berhubungan dengan kependudukan di Kota Ternate. Aspek yang digambarkan dalam GDPK adalah aspek kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk serta aspek kependudukan lainnya seperti pembangunan keluarga dan data dan informasi kependudukan di Kota Ternate.
- 2. Langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan ini adalah Pertama melakukan identifikasi kondisi eksisting aspek kuantitas penduduk, kualitas penduduk, dan mobilitas penduduk serta aspek kependudukan lainnya seperti pembangunan keluarga dan data dan informasi kependudukan di Kota Ternate. Kedua menformulasikan roadmap pembangunan kependudukan, kebijakan, strategi, program pokok di Kota Ternate. Ketiga, merumuskan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Ternate.

## I. Sistematika

BAB I, pendahuluan, bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, tujuan, sasaran, pengertian, ruang lingkup, dan pendekatan pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan.

BAB II, analisis situasi kependudukan dan capaian pembangunan kependudukan, bab ini berisikan analisis situasi kependudukan dan capaian pelaksanaan pembangunan 5 pilar kependudukan yang mendeskripsikan sejumlah temuan yang merupakan hasil dari kajian dokumen kebijakan.

BAB III, proyeksi penduduk dan kondisi ideal kependudukan, bab ini berisi data parameter kependudukan 5 tahun hasil perhitungan proyeksi, analisis potensi serta dampak yang ditimbulkan, serta kondisi ideal yang diharapkan.

BAB IV, visi dan isu strategis pembangunan kependudukan daerah, bagian ini menjabarkan visi-misi dan isu strategis dari grand design pembangunan kependudukan (GDPK) yang diharapkan menjadi rujukan berbagai pemangku kepentingan nasional maupun daerah.

BAB V, kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan daerah, bab ini menguraikan sejumlah arahan strategis kebijakan daerah dalam pembangunan 5 pilar kependudukan, yang diharapkan dapat terinternalisasi dalam penjabaran operasional di berbagai dokumen pembangunan sesuai penahapan yang direncanakan pada lima (5) pilar pembangunan kependudukan.

BAB VI, peta jalan (Roadmap), bagian ini merupakan penahapan implementasi grand design pembangunan kependudukan sesuai periode tertentu (5 tahunan), selain penahapan yang bersifat umum sebagai derivasi RPJPN, terdapat pula penahapan akselerasi yang diproyeksikan sebagai upaya percepatan pemenuhan kebutuhan pembangunan kependudukan (program prioritas).

BAB VII, penutup, berisi kesimpulan serta rekomendasi kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan.

# BAB II. ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DI KOTA TERNATE

### A. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Memang disadari bahwa pengendalian kuantitas penduduk harus dibarengi dengan peningkatan kualitas penduduk, sehingga secara bertahap peningkatan jumlah penduduk yang terkendali akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga diharapkan dapat bersaing secara ketat pada persaingan global. Disisi lain harus diakui pertumbuhan pendudukan yang tinggi belum dibarengi dengan peningkatan kualitas penduduk. Oleh karena itu diperlukan pemahaman bersama dan perlu untuk menanamkan persepsi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang arti pentingnya pengendalian kuantitas serta diimbangi dengan peningkatan kualitas. Karena kondisi ini akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, pertahanan keamanan, daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak dinamika kependudukan agar tidak menghambat kelancaran pembangunan di segala bidang kehidupan yang sedang digalakkan.

Pada tahun 2020-2025 diperkirakan angka fertilitas total akan menurun mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang (replacement level fertiliy) dengan TFR sebesar 2,1 per wanita atau net reproduction rate (NRR) sebesar 1 per wanita. Angka fertilitas ini secara konsisten diharapkan terus menurun sehingga pada tahun 2035, angka fertilitas total di Indonesia mencapai 1,93 anak per wanita dan net reproduction rate sebesar 0,9 per wanita. Di sisi lain angka kelahiran kasar (crude birth rate/CBR) juga menurun dari sekitar 19,2 kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2015 menjadi sekitar 14,0 kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2035.

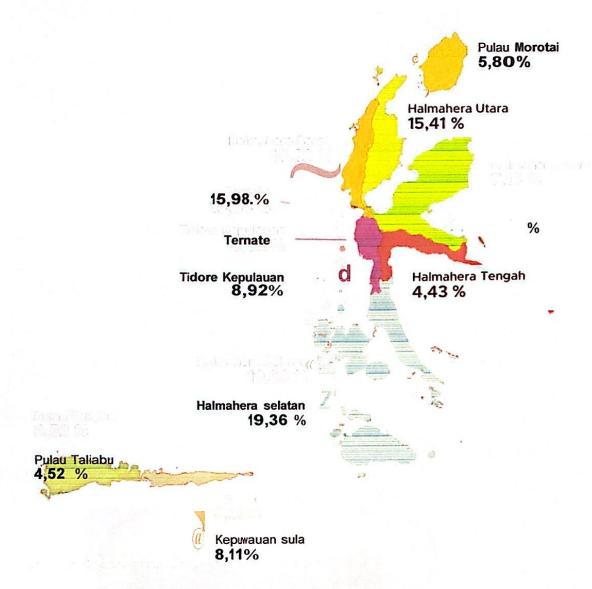
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Maluku Utara yang makin melambat belum dibarengi dengan jumlah penduduk yang masih akan bertambah. Di mana pada tahun 2015 jumlah penduduk Maluku Utara tercatat sebesar 1,17 juta jiwa atau berlipat 1,12 kalinya dari jumlah penduduk pada tahun 2010. Pelambatan pertambahan jumlah penduduk terjadi karena LPP sedikit menurun dari 2,47 persen per tahun pada periode 2000-2010 menjadi 2,33 persen per tahun pada periode 2010-2015. Pada periode 2015-2020, LPP kembali menurun menjadi 1,82

persen dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk Maluku Utara pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,28 juta jiwa. Penurunan LPP ini disebabkan keberhasilan pemerintah dalam menurunkan tingkat kelahiran dan kematian melalui program Keluarga Berencana (KB) dan pembangunan fasilitas serta peningkatan kualitas tenaga teknis di bidang kesehatan. Tren perlambatan LPP ini diperkirakan akan terus berlanjut walaupun pada periode 2025-2030 diperkirakan akan mengalami sedikit peningkatan namun kembali melambat pada periode selanjutnya.

Sejalan dengan situasi dan kondisi kependudukan di atas, Sebaran penduduk Provinsi Maluku Utara masih belum merata, yaitu masih terpusat pada kabupaten/kota tertentu seperti Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara. Walaupun Provinsi ini merupakan daerah yang memiliki letak strategis dan kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Namun, hal tersebut tidak akan menjamin kemajuan daerah ini jika tidak dibarengi dengan kualitas dari Sumber Daya Manusianya (SDM). Namun daerah ini dimana penduduk

Dilain pihak, sebaran penduduk Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan dihuni oleh 19,36 % dari populasi penduduk Maluku Utara, sehingga merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar. Sebaliknya, Kota Tern ate yang memiliki wilayah terkecil di Provinsi Maluku Utara dihuni oleh 15,98 % dari populasi penduduk Maluku Utara dan merupakan Kota dengan penduduk terbesar kedua setelah Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya Kabupaten Halmahera Utara berada pada urutan ketiga penduduk terbesar di Maluku Utara dengan jumlah sebesar 15,41 %. Sedangkan, Kabupaten Halmahera Tengah tercatat merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terkecil yaitu sebesar 4,43 % dari populasi penduduk Maluku Utara, dan selanjutnya adalah sebaran penduduk di Provinsi Maluku Utara.

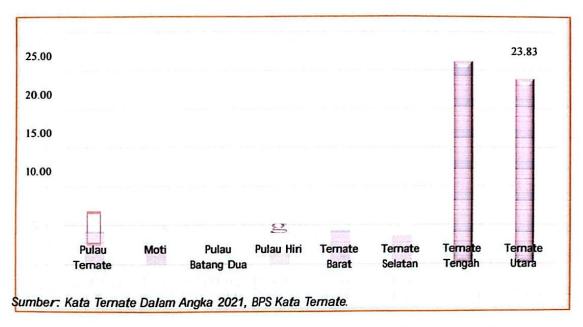
Gambar II. 1 Sebaran Penduduk di Provinsi Maluku Utara tahun 2020



Sumber: Maluku Utara Dalam Angka 2021, BPS Malut

Secara lengkap distribusi prosentase penduduk menurut Kecamatan di Kota Ternate sampai dengan tahun 2020 (SP2020), dapat disajikan pada gambar berikut:

Gambar II. 2 Distribusi Persentase Penduduk di Kata Ternate Menurut Kecamatan tahun 2021



Berdasarkan Gambar 11.2 di atas, distribusi persentase penduduk di Kota Ternate menurut kecamatan pada tahun 2021, menunjukan bahwa distribusi persentase penduduk terbanyak terkonsentrasi pada Kecamatan Ternate Tengah yaitu 26,13 %. Dan yang terendah adalah Kecamatan Pulau Batang Dua yaitu 0,14 % dan kecamatan ini juga memiliki luas wilayahnya adalah 29,02 % dari total luas wilayah Kota Ternate atau luas wilayah terbesar kedua setelah Kecamatan Ternate Barat yaitu seluar 33,88 % Dan luas wilayah terkecil adalah kecamatan Pulau Hiri yaitu seluas 6,69 % dari total luas wilayah Kota Ternate. Sedangkan kecamatan yang memiliki distribusi Prosentase penduduk terbesar yaitu kecamatan Ternate Tengah dan Ternate Utara hanya memiliki luas wilayah yaitu masing dengan luas wilayah sebesar 13,26 % dan 13,92 % dari total luas wilayah Kota Ternate.

#### 1) Pertumbuhan Penduduk dan Dependency Ratio

Laju Pertumbuhan Penduduk dan Dependency Ratio merupakan parameter yang dapat menggambarkan kondisi dari transisi demografi pada suatu wilayah. Dimana Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu dan lebih menggambarkan kondisi sosial-demografi penduduk karena berhubungan dengan sikap dan perilaku masyarakat dalam merencanakan suatu

keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan (ketahanan keluarga), sedangkan Transisi Demografi menjelaskan tentang jumlah penduduk di suatu wilayah akan selalu berubah, perubahannya diakibatkan oleh bekerjanya 2 komponen utama dalam demografi yaitu fertilitas dan mortalitas. Perubahan pada kedua komponen tersebut akan mempengaruhi jumlah penduduk dan struktur umur penduduk yang pada akhirnya akan menjadi determinan dari seberapa besar terjadi angka beban ketergantungan. Dan dilain pihak proporsi penduduk usia dibawah 15 tahun masih stagnan sedangkan proporsi penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) belum mengalami perubahan yang berarti, sementara lansia juga perlahan-lahan semakin meningkat. Jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat, jika tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka akan menimbulkan dampak negatif, menghambat pembangunan ekonomi, dan dapat menjadi 'beban' jika kualitas penduduknya rendah dan tidak produktif.

Dan komponen yang mempengaruhi Laju Pertumbuhan penduduk adalah faktor kematian, kelahiran, dan migrasi, Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, sepanjang 2020-2021, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Ternate adalah sebesar 0,004 %, atau lebih rendah dari Laju Pertumbuhan Provinsi Maluku Utara yaitu 1,82 %.

Selanjutnya untuk melihat kondisi beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Atau dengan kata lain, perbandingan (rasio) antara jumlah penduduk usia non produktif (0-14 dan 65+ tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) disebut *Dependency Ratio* (DR). Semakin tinggi *dependency ratio* menggambarkan semakin berat beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif karena harus mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia non produktif. Sedangkan persentase DR yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Secara kasar, DR dapat digunakan sebagai indikator ekonomi dari suatu negara apakah tergolong maju atau bukan (LDFE, UI).

18

Sehingga dapat dikatakan bahwa Dependency ratio adalah unsur penting yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. DR juga dapat menjadi indikator kemajuan ekonomi suatu wilayah. Ketika DR tinggi maka pertumbuhan ekonomi terganggu atau penghasilan masyarakat rendah, sementara itu jika DR rendah maka dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena sebagaian besar penghasilannya digunakan untuk berinvestasi dan menabung, dengan catatan bahwa seluruh usia produktif tersebut bekerja dengan produktif. Tingginya dependency ratio dapat menjadi faktor penghambat pembangunan di negara berkembang termasuk di Indonesia, karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari golongan produktif, terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang belum dan sudah tidak produktif, apabila dengan tanggungan penduduk yang kecil maka akan lebih mudah memobilisasi dana masyarakat dan anggaran pemerintah untuk investasi yang lebih produktif. Pada rasio ketergantungan penduduk yang rendah terjadi proses penghematan bahan makanan dan bahan baku lainnya sekaligus terjadi kualitatif kehidupan penduduk, hal ini selanjutnya akan meningkatkan angka harapan hidup (life expentancy) di wilayah tersebut (Andi Nurul Adiana Reski Agus, 2016).

Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin cepat laju pertambahan penduduk, akan semakin besar pula proporsi penduduk berusia muda yang belum produktif (0-14 tahun) dalam total populasi, dan semakin berat pula beban tanggungan penduduk yang produktif (Todaro dan Stephen, 2000). Rasia beban tanggungan penduduk menjadi variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, melalui beban tanggungan penduduk yang ditanggung penduduk usia produktif. Mekanismenya adalah apabila jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah usia non produktif maka akan menghasilkan rasio angka beban tanggungan yang kecil. Sehingga lebih sedikit penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Sebaliknya, bila jumlah penduduk usia produktif lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk usia non produktif maka akan menghasilkan rasio angka beban tanggungan yang lebih besar. Apabila beban tanggungan penduduk usia produktif tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena pendapatan penduduk

usia produktif digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia non produktif sehingga menurunkan hasil untuk investasi dan saving.

Dengan melihat kondisi struktur penduduk di Kota Ternate, maka sampai dengan tahun 2020, Angka Beban Ketergantungannya (dependency ratio) adalah sebesar 42,15 % atau beban tanggungan penduduk yang ditanggung penduduk usia produktif sangat tinggi yaitu 42,15 %. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kota Ternate menanggung beban sebanyak 42 hingga 43 penduduk yang belum produktif dan yang dianggap tidak produktif lagi. Berdasarkan pada indikator kependudukan ini menunjukan bahwa tingginya dependency ratio dapat menjadi faktor penghambat pembangunan, karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari golongan produktif, terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang belum dan sudah tidak produktif, apabila dengan tanggungan penduduk yang kecil maka akan lebih mudah memobilisasi dana masyarakat dan anggaran pemerintah untuk investasi yang lebih produktif. Pada rasio ketergantungan penduduk yang rendah terjadi proses penghematan bahan makanan dan bahan baku lainnya sekaligus terjadi kualitatif kehidupan penduduk, hal ini selanjutnya akan meningkatkan angka harapan hidup (*life expentancy*).

#### 2) Parameter Fertilitas

Fertilitas merupakan salah satu komponen yang menjadi faktor penentu dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk disamping Mortalitas dan Mobilitas. Indikator fertilitas terdapat berbagai macam, antara lain adalah Total Fertility Rate (TFR) dan Crude Birth Rate (CBR). Oleh karena itu fertilitas diartikan sebagai kemampuan seorang wanita untuk menghasilkan kelahiran hidup merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk disamping migrasi masuk, tingkat kelahiran dimasa lalu mempengaruhi tingginya tingkat fertilitas masa kini. Dimana Fertilitas merupakan hasil reproduksi nyata dari seorang atau sekelompok wanita, sedangkan dalam pengertian demografi menyatakan banyaknya bayi yang lahir hidup.

Jadi besar kecilnya jumlah kelahiran dalam suatu penduduk, tergantung pada beberapa faktor misalnya: struktur umur, tingkat pendidikan, umur pada waktu kawin

pertama,banyaknya perkawinan, status pekerjaan wanita, penggunaan alat kontrasepsi dan pendapatan/kekayaan. Dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat fertilitas, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi, sehingga pengukuran terhadap fertilitas ini dilakukan melalui dua macam pendekatan yaitu *Yearly Performance dan Reproductive History* yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa teknik penghitungan yang masing-masing memiliki kebaikan dan kelemahan. Salah satu teknik yang termasuk dalam pendekatan *Yearly Performance* adalah *Total Fertility Rate* (TFR) atau Angka Kelahiran Total. Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap wanita. Kebaikan dari teknik ini adalah merupakan ukuran untuk seluruh wanita usia 15-49 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur.

Dilain pihak variasi mengenai besar kecilnya kelahiran antar kelompok penduduk tertentu, karena tingkat fertilitas penduduk ini dapat pula dibedakan menurut jenis kelamin, umur, status perkawinan, atau kelompok-kelompok penduduk yang lain. Diantara kelompok perempuan usia reproduksi (15-49) terdapat variasi kemampuan melahirkan, karena itu perlu dihitung tingkat fertilitas perempuan pada tiap-tiap kelompok umur Age Specific Fertility Rate (ASFR). ASFR dapat diartikan sebagai banyaknya kelahiran tiap seribu wanita pada kelompok umur tertentu. Dengan ASFR dimungkinkan pembuatan analisis perbedaan fertilitas (current fertility) menurut berbagai karakteristik wanita.

Pengaturan Fertilitas dalam jangka panjang merupakan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan penduduk seimbang menuju kondisi stasioner, dimana angka kelahiran hampir sama dengan angka kematian. Kondisi dalam jangka panjang juga akan berdampak pada pengurangan resiko terhadap ketergantungan (dependency ratio) yang akan menghasilkan penduduk tidak produktif tergantung dengan penduduk usia produktif.

Pada proses pembangunan menjaga agar jumlah penduduk selalu stabil sangat penting untuk dilakukan. Salah satu indikator untuk melihat hal tersebut adalah melalui fertilitas (angka kelahiran). Fertilitas sendiri merupakan suatu hasil reproduksi nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Sementara atau angka kelahiran total (total fertility rate)

menggambarkan rata-rata kemampuan seorang wanita untuk melahirkan selama masa reproduksinya.

Selanjutnya metode analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan dari Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010 hingga 2035 serta hasil survei dan beberapa kajian empiris. Analisis GDPK ini digunakan untuk menganalisis terkait kualitas penduduk di Provinsi Maluku Utara berdasarkan tingkat fertilitas. Analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Maluku Utara diproyeksikan menurun dari tahun 2010 hingga 2035. CBR di Provinsi Maluku Utara juga mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga 2035. TFR dan CBR yang menurun ini menunjukkan kualitas penduduk yang semakin baik di Provinsi Maluku Utara.

Di Kota Ternate pada tahun 2020 berdasarkan estimasi dan proyeksi SUSENAS 2017 - 2019 untuk target RPJMD Kabupaten/Kota oleh BKKBN adalah 2,19. Namun, di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2,17 berdasarkan Hasil Perhitungan Pendataan Keluarga (PK 2021). Selanjutnya sampai dengan tahun 2026 di targetkan mengalami penurunan menjadi 2,10.

# 3) Indikator TFR, GRR dan NRR

Perlu dijelaskan bahwa karena keterbatasan data, maka estimasi TFR tahun 2020 menggunakan tren ASFR (angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun /age specific fertility rate 15-19 tahun) dari data Proyeksi Penduduk tahun 2010-2035. Tren tersebut digunakan untuk memproyeksi capaian TFR tahun 2020 dengan menggunakan data dasar Sensus. Hal ini dapat menjadi alasan karena Age Specific Fertility Rate (ASFR) merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Jadi ASFR, 15-49 tahun adalah banyaknya kelahiran tiap seribu wanita pada kelompok umur wanita usia 15-49 tahun. Dengan melihat pola ASFR membentuk huruf U terbalik berarti Kelompok umur ini merupakan kelompok usia muda (remaja) yang berpotensi menunjukan tren yang meningkat. Sehingga perhatian terhadap angka fertilitas pada kelompok ini menjadi perhatian serius.

Di Kota Ternate pada tahun 2020 TFR adalah 2,19 perWUS (15-49 tahun) berarti berada dibawah provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 2,82. Perolehan TFR sebesar 2,19 ini, dapat dijelaskan bahwa di Kota Ternate, wanita usia 15-49 tahun secara rata-rata mempunyai 2•3 anak selama masa reproduksinya. Sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2,18. Selanjutnya sampai dengan tahun 2026 di targetkan mengalami penurunan menjadi 2,10.

Dan di Kota Ternate pada tahun 2020 untuk perhitungan Angka Reproduksi Neto {Net Reproduction Rate - NRR), angka kelahiran kasar atau Crude Birth Rate {CBR} dan angka reproduksi bruto (Gross Reproduction Rate - GRR) diperhadapkan pada minimnya data atau tidak tersedia maka digunakan metode interpolasi dari hasil perolehan rata-rata kabupaten/kota pada tahun 2015 - 2019 dengan penentuan target di tahun 2025, Tingkat Reproduksi Neto adalah jumlah anak perempuan yang dilahirkan per 1.000 penduduk perempuan dengan mempertimbangkan kemungkinan bayi tersebut meninggal dalam usia reproduksi. Dikatakan reproduksi neto karena ukuran ini telah mempertimbangkan kemungkinan meninggal. Berbeda halnya dengan Gross Reproduksi Bruto {GRR}, kemungkinan meninggal dari bayi perempuan tersebut belum dipertimbangkan.

Gross Reproduction Rate (GRR) dan Net Reproduction Rate (NRR) merupakan ukuran fertilitas yang berkaitan dengan kemampuaan penduduk perempuan melahirkan bayi perempuan untuk menggantikan dirinya bereproduksi. Ukuran yang didapatkan umumnya dinyatakan dengan reproduksi (reproduction), bukan fertilitas (fertility).

Gross Reproduction Rate (GRR) atau tingkat reproduksi bruto adalah jumlah anak perempuan yang dilahirkan hidup per 1.000 penduduk perempuan dengan asumsi bahwa tidak ada bayi perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri usia reproduksi. Di Kota Ternate pada tahun 2020, Angka Reproduktif Bruto (Gross Reproduction Rate/GRR) adalah 1,07 kelahiran bayi perempuan yang artinya bahwa rata-rata jumlah bayi perempuan yang akan dilahirkan pada suatu kohor perempuan selama usia reproduksi di Kota Ternate adalah cenderung mempunyai 1-2 bayi perempuan. Sedangkan Angka Reproduksi Neto (Net Reproduction Rate — NRR) adalah jumlah anak perempuan yang dilahirkan per 1.000

penduduk perempuan dengan mempertimbangkan kemungkinan bayi tersebut meninggal dalam usia reproduksi. Dikatakan reproduksi neto karena ukuran ini telah mempertimbangkan kemungkinan meninggal. Berbeda halnya dengan Reproduksi Bruto (GRR), kemungkinan meninggal dari bayi perempuan tersebut belum dipertimbangkan. Dalam ukuran reproduksi neto ini, kemungkinan meninggal dihitung menggunakan label Kematian.

Angka Reproduksi Neto (Net Reproduction Rate – NRR) adalah sebesar 1,32 yang artinya bahwa setiap perempuan usia produktif rata-rata memiliki anak perempuan yang akan menggantikan sistem reproduksinya adalah 1—2 anak perempuan. Sedangkan untuk angka kelahiran kasaratau Crude Birth Rate (CBR) yang merupakan angka kelahiran kasar, disebut 'kasar' karena cara perhitungan dengan cara membandingkan jumlah kelahiran hidup dengan jumlah seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan, semua usia baik yang subur maupun tidak subur. Dimana salah satu ukuran yang sering dipakai untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu negara atau wilayah (propinsi, kabupaten/kota) pada suatu waktu tertentu adalah Angka Kelahiran Kasar atau Crude Birth Rate (CBR). Nilai CBR dari masa ke masa dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan (kenaikan atau penurunan) populasi penduduk di suatu negara atau wilayah dan dapat dibandingkan dengan negara-negara atau wilayah lain. Selain itu, nilai CBR dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan jumlah bayi lahir hidup dan jumlah ibu hamil.

Di Kota Ternate pada tahun 2020, Angka Kelahiran Kasar atau *Crude Birth Rate* (CBR) adalah sebesar 22,35 kelahiran per 1000 penduduk. Sehingga Angka Kelahiran Kasar (CBR) ini dapat diartikan sebagai banyaknya kelahiran hidup di Kota Ternate pada tahun 2020 adalah 22 – 23 kelahiran per 1000 penduduk. Ini merupakan perhitungan sederhana, karena hanya memerlukan keterangan tentang jumlah anak yang dilahirkan dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Namun perhitungan CBR ini tidak memisahkan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan yang masih kanak-kanak dan yang berumur 50 tahun keatas. Jadi angka yang dihasilkan sangat kasar. karena penduduk yang terpapar yang digunakan sebagai penyebut adalah penduduk dari semua jenis kelamin

(laki-laki dan perempuan) dan semua umur (anak-anak dan orang tua) yang tidak mempunyai potensi untuk melahirkan.

### B. Peningkatan Kualitas Penduduk

Pada dasarnya upaya untu meningkatkan kualitas, kuantitas dan mobilisasi penduduk berdampak besar pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Karena dalam mencapai tujuan pembangunan, penduduk merupakan salah satu obyek dan subyek pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penduduk pada dasarnya adalah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya mulai dari segi ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, kesehatan, dan segi lainnya. Karena Pembangunan penduduk yang berkualitas tinggi akan mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi dan social, sebaliknya, dengan kualitas penduduk yang rendah akan dapat menimbulkan masalah yang tersendiri didalam pembangunan dan berdampak pada kesejahteraan keluarga. Kualitas penduduk yang rendah akan menjadi beban dari pembanguan dan memperlambat tercapainya tujuan pembanguan yang bertujuan untuk mensejahterakan penduduk itu sendiri.

Sehingga Upaya pemerintah dalam mengatasi kualitas penduduk umumnya di lakukan melalui bidang Pendidikan, Kesehatan dan gizi masyarakat serta bidang pendapatan masyarakat serta perbaikan sarana dan prasarana pada bidang-bidang tersebut. Namun sehubungan dengan peningkatan kualitas penduduk dan pengendalian kuantitas penduduk, maka pengendalian pertumbuhan penduduk merupakan salah satunya sebagai langkah penting dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keluarga kecil sejahtera. Pentingnya aspek kependudukan dalam peningkatan Kesehatan dan menurunkan kematian bayi dan anak meningkatkan kesehatan ibu, mendorong indeks pembangunan manusia dan pendidikan serta peningkatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

# 1) Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

Salah satu tolok ukur yang penting pemerintah khususnya di bidang Kesehatan dan merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Angka Kematian Bayi (AKB), sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah

jumlah kematian ibu selama kehamilan atau dalam waktu 42 hari setelah akhir kehamilan (pasca persalinan) dengan berbagai macam penyebab yang berhubungan atau diperburuk oleh kehamilan, akan tetapi bukan karena kasus kecelakaan atau yang terjadi secara incidental.

Oleh karena itu penanganan derajat kesehatan di suatu daerah dapat dilakukan melalui berbagai indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kedua indikator tersebut merupakan hal yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang dapat menentukan keberhasilan program kesehatan ibu dan anak.

Untuk menganalisis kualitas penduduk di Kota Ternate juga harus didasarkan pada parameter-parameter kesehatan tersebut. Karena informasi mengenai tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dalam menyongsong kelahiran, yang bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Hal penting yang menjadi fokus kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan isu kesehatan, aspek pertama yang perlu dilihat adalah Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), yaitu angka yang menunjukkan probalitas bayi hidup sampai usia satu tahun. AKHB ini sangat dipengaruhi oleh Angka Kematian Bayi, yaitu kematian yang terjadi antara saat setelah bayi sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitive terhadap keadaan lingkungan tem pat orang tua si bayi tinggal (faktor eksternal) dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi (faktor internal). Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian maka sering dikatakan bahwa angka

kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitive dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Faktor internal dan eksternal tersebut dapat dijadikan fokus dalam pengembangan dan perencanaan peningkatan derajat kesehatan.

Di Kota Ternate Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2020, masing-masing adalah sebesar 20 kematian per 1000 kelahiran hidup dan 4 kematian per 1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu antara lain, pendarahan, retensio, infeksi, Preeklamsia dan Hiperemesis. Selain penyakit-penyakit tersebut, kematian ibu juga dapat disebabkan oleh pelayanan kesehatan pada masing-masing daerah serta rendahnya pengetahuan ibu. Sedangkan penyebab Angka Kematian Bayi (AKB) antara lain adalah faktor ibu selama hamil dan melahirkan, seperti rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, rendahnya pemeriksaan selama hamil, dan juga status gizi ibu hamil yang masih rendah.

AKB di Kota Ternate meningkat pada tahun 2021 yaitu sebesar 6 kematian per kelahiran hidup. Tingginya Angka kematian bayi tahun 2021 disebabkan oleh disamping pandemic covid 19 juga dari berbagai faktor risiko yang terjadi mulai dari fase sebelum hamil yaitu kondisi wanita usia subur yang anemia, kurang energi kalori, obesitas, mempunyai penyakit penyerta seperti tuberculosis dan lain-lain. Pada saat hamil ibu juga mengalami berbagai penyulit seperti hipertensi, perdarahan, anemia, diabetes, infeksi, penyakit jantung dan lain-lain. Tetapi kondisi ini perlu dicermati mengingat kecenderungan jumlah kematian bayi yang meningkat dalam kurun waktu beberapa tahun di hampir semua kabupaten/kota di Maluku Utara. Selain itu, data kematian bayi tersebut belum merepresentasikan keadaan yang sesungguhnya di Kota Ternate mengingat belum semua puskesmas/rumah sakit melaporkan jumlah bayi yang meninggal dalam perawatan di puskesmas/rumah sakit yang bersangkutan serta belum termasuk jumlah bayi yang meninggal di rumah.

Dengan demikian sangat penting untuk mencermati angka kematian bayi secara komprehensif dalam komunitas dengan membandingkan AKB yang diperoleh dari hasil survey maupun penelitian ilmiah lainnya dan memperbaiki sistematika pelaporan kematian

bayi di seluruh fasilitas Kesehatan baik milik pemerintah maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola swasta serta pencatatan kematian bayi yang meninggal di rumah. Pencatatan tentang kejadian ini akan membantu agenda pembangunan sektor kesehatan untuk menekan Angka Kematian Bayi yang hingga kini masih menjadi agenda prioritas pemerintah Daerah maupun Nasional.

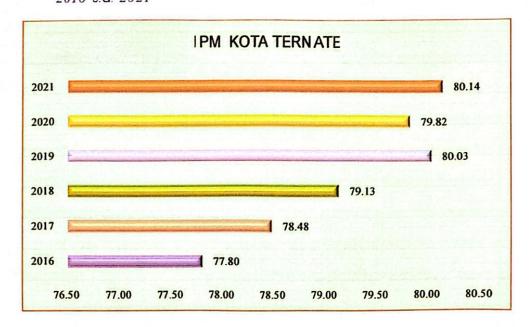
## 2) Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990, *United Nations Development Programme* (UNDP) membangun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimiliknya dalam pembangunan. Sejak tahun 2010 IPM Indonesia terus tumbuh secara konsisten. Pada tahun 2020 pertumbuhan IPM di tingkat nasional dan daerah menghadapi tantangan dengan tumbuh melambat akibat pandemi VID-19 yang melanda Indonesia dan sebagian besar negara di dunia. Perlambatan pertumbuhan IPM umumnya disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan umur harapan hidup dan pendidikan, serta menurunnya pengeluaran riil per kapita sebagai akibat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur hara pan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Selanjutnya perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ternate selama periode tahun 2017 s.d. 2021 adalah sebagai berikut:

Gambar II. 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kata Ternate tahun 2016 s.d. 2021



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari hara pan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Oleh karena itu IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/ Negara.

IPM metode baru yang disempumakan pada tahun 2014 memiliki beberapa keunggulan yang diantaranya adalah :

- 1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik;
- Penggunaan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa memberikan gambaran yang lebih relevan tentang dimensi pendidikan dan perubahannya;
- Penggunaan PNB yang menggantikan PDB dapat lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah;

29

4. Menggunakan rata-rata geometrik yang tidak serta merta dapat menutupi kekurangan pada suatu dimensi dengan dimenesi lain yang unggul. Dengan kata lain, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik diperlukan keseimbangan antar dimensi yang sama penting.

#### 3) Parameter Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah dipengaruhi oleh kualitas penduduk. Secara umum pembangunan sendiri didefinisikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan dengan sadar dan terencana agar dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dan peningkatan kualitas penduduk merupakan salah satu upaya dalam pembangunan. Salah satu peningkatan kualitas penduduk yang penting adalah pendidikan. Peningkatan pendidikan dapat menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat memajukan bangsa maupun negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sama halnya dengan pembangunan, maka pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kualitas Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan, salah satunya adalah melalui jalur pendidikan agar tercapai kemajuan bagi suatu bangsa yang sedang membangun dan memperbaiki kualitas pendidikan. Hal ini disebabkan dengan pendidikan kecerdasan dan ketrampilan masyarakat akan terwujud. Perbaikan kualitas pendidikan akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia secara universal.

Sarana pendidikan di Kota Ternate cukup memadai dengan tersedianya sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Tahun 2020 jumlah SD baik negeri/swasta sebanyak 110 buah dengan jumlah guru sebanyak 1.175 dan jumlah murid 16.032, kemudian jumlah SLTP sebanyak 30 buah dengan jumlah guru sebanyak 978 dan jumlah murid 9.349. Untuk jenjang pendidikan SLTA /SMU negeri negeri/swasta sebanyak 20 buah dengan jumlah guru sebayak 543 dan jumlah murid sebanyak 7.043. Sedangkan

jumlah SMK negeri/swasta sebanyak 9 buah dengan jumlah guru sebanyak 278 dan jumlah murid sebanyak 3.528.

Memang disadari bahwa kualitas dan mutu pendidikan menjadi aspek penting yang patut diperhatikan dalam pendidikan di sekolah. Namun demikian, ukuran kelas dan rasio antara guru serta murid yang ideal juga menjadi salah satu aspek pendidikan yang lebih penting. Karena rasio guru dan murid dapat menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar; melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan, pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid. Dan ternyata di Kata Ternate Rasia Guru dan Murid untuk semua jenjang Pendidikan berada di bawah standar ideal yang berarti bahwa semakin kecil rasio semakin baik mutu pengajaran. Yaitu untuk tingkat SD Rasia Guru-Murid adalah 13,64 atau lebih kecil dari rasio ideal sebagaimana yang diamanatkan dalam PP nomor 74/2008 tentang guru di atas. Selanjutnya untuk tingkat SLTP Rasia Guru-Murid adalah 9,564 atau jauh lebih kecil dari rasio ideal, dan untuk tingkat SLTA Rasia Guru-Murid adalah 12,97 atau lebih kecil dari rasio ideal serta untuk tingkat SMK Rasia Guru-Murid adalah 12,69 atau lebih kecil dari rasio ideal untuk SMK adalah 15 murid.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Untuk kriteria APK adalah makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. Dan

kegunaannya adalah untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Dengan kriterianya yaitu makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekalah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Dan kegunaannya adalah untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekalah pada jenjang yang sesuai.

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat partisipasi penduduk di bidang pendidikan. Di Kata Ternate sampai dengan tahun 2020, Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 7-12 tahun (usia ideal di bangku SD) sudah mencapai 100 % artinya dari 100 penduduk usia 7-12 tahun bersekalah. Demikian pula, Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 13-15 tahun (usia ideal di bangku SMP) sudah mencapai 100 %. Pada usia penduduk 16-18 tahun partisipasi sekolah mencapai 86,42 %. Yang artinya bahwa di Kata Ternate sampai dengan tahun 2020 masih terdapat 12 —13 penduduk yang tidak bersekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan parameter yang digunakan untuk menentukan nilai proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan proporsi penduduk sekalah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Di Kata Ternate sampai dengan tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk penduduk usia 7• 12 tahun (usia SD) adalah 108,71 %. Kemudian Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk penduduk usia 13-15 tahun (usia SMP) adalah 88,28 %. Dan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk penduduk usia 16-18 tahun (usia SMA) adalah 93,44 %.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan parameter yang paling sederhana dalam pengukuran penduduk usia sekolah yang terserap dalam jenjang pendidikan masing-masing. Nilai APK dapat lebih dari 100% (persen), hal ini dikarenakan oleh proporsi penduduk yang sedang sekolah pada jenjang pendidikan tertentu memiliki umur di luar batas yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tinggi merepresentasikan tingkat partisipasi penduduk yang tinggi dalam

bersekolah, tanpa melihat usia yang tepat dalam bersekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK yang melebihi nilai 100% (persen), maka terdapat melebihi umur yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tersebut. Nilai APK dapat melebihi angka 100% (persen), sedangkan nilai APM memiliki nilai maksimal 100% (persen).

Selanjutnya Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara penduduk yang bersekolah dengan usia yang sesuai dengan jenjang pendidikannya yang dibandingkan dengan jumlah penduduk di usia yang sama. Oleh karena itu maka, Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. Nilai APM mencapai 100% (persen), jika seluruh penduduk usia sekolah bersekolah pada usia yang tepat waktu.

Di Kota Ternate sampai dengan tahun 2020 Angka Partisipasi Murni (APM) untuk penduduk usia 7–12 tahun (usia SD) adalah 97,21 %. Kemudian Angka Partisipasi Murni (APM) untuk penduduk usia 13 -15 tahun (usia SMP) adalah 76,90 %. Dan Angka Partisipasi Murni (APK) untuk penduduk usia 16 -18 tahun (usia SMA) adalah 64,25 %.

Nilai APM pada umumnya memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai APK karena nilai APK tidak memperhatikan ketepatan usia sekolah dalam jenjang pendidikan tertentu. Selisih antara nilai APK dengan nilai APM menunjukkan proporsi penduduk yang sedang bersekolah dengan usia yang terlambat bersekolah atau usia yang terlalu cepat bersekolah.

## 4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam hal kesejahteraan penduduk adalah indikator ketenagakerjaan. Kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja baru, merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Permasalahan penting dalam bidang ketenagakerjaan selain keadaan tenaga kerja dan struktur ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran yang selama ini kita hadapi. Dari sisi ekonimi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas

tidak mampu menyerap pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan permasalahan dibidang ekonomi, namun juga menimbulkan berbagai masalah dibidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara signifikan dialami Kota Ternate, TPT di Kota Ternate tahun 2020 yang tercatat 6.341 orang atau hanya sebesar 5,80 % dari total angkatan kerja.

Selanjutnya peningkatan angka partisipasi angkatan kerja di tahun 2020 juga diikuti dengan capaian pada tingkat partisipasi kerja yang menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk Angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) juga meningkat dalam posisi yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan keadaan Angka Partisipasi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Ternate pada tahun 2020 dapat disajikan pada table II.2 sebagai berikut:

Tabet 111 Keadaan Angka Partisipasi don Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kata Ternate tahun 2020

KEGIATAN UTAMA	JENIS KELAMIN				
KEGIATAN UTAMA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1. Angakatan Kerja	70.342	38.905	109.247		
Angka Partisipasi Kerja	66.165	36.741	102.906		
Pengangguran Terbuka	4.177	2.164	6.341		
2. Bukan Angkatan Kerja	22.075	51.117	73.192		
Sekolah	11.395	13.050	24.445		
Mengurus Rumah Tangga	4.496	35.017	39.513		
Lainnya	6.184	3.050	9.234		
Jumlah	92.417	90.022	182.439		

Sumber: BPS, Kata Ternate Dalam Angka 2021

Rendahnya angka pengangguran terbuka ini (5,80 % dari total angkatan kerja) cukup signifikan karena dipengaruhi oleh keberhasilan Pemerintah Kota Ternate dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang ditandai dengan kemajuan sektor jasa dan

perdagangan, antara lain bermunculannya sejumlah pusat jasa dan perdagangan baru seperti di bidang jasa, restoran, hotel dan pusat perbelanjaan serta ruko dan pasar, yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, hal ini juga mendorong pemasaran berbagai komoditi lokal, oleh karena itu kedepan pengembangan investasi di Kota Ternate akan tetap dilanjutkan, dan hal tersebut menjadi tuntutan dan kewajiban kita semua untuk tetap menciptakan iklim dunia usaha dan investasi untuk masa-masa yang akan datang.

## C. Pembangunan Keluarga

Keluarga merupakan unit masyarakat yang terkecil yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pengembangan kualitas SDM yang mencakup pengembangan kemampuannya, kemampuan menghadapi tantangan dan mencegah resiko terhadap masalah di sekeliling mereka.

Pada era millenium ini, Orientasi pembangunan keluarga menitikberatkan pada generasi muda. yang merupakan jumlah yang besar dan merupakan modal dalam menyongsong bonus demografi, di mana puncak bonus demografii di Indonesia diperkirakan akan terjadi pada 2028-2031.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, sehingga diperlukan intervensi berbeda namun berkelanjutan. Selanjutnya ketahanan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Namun demikian pembangunan keluarga terutama pada generasi muda ini sangat terbatas. Remaja dan anak muda yang seharusnya bisa tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang a man dan nyaman serta mampu mempersiapkan diri menyongsong masa depannya justru tak sedikit yang mengalami persoalan dan menghambat bangsa Indonesia dalam upaya memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Tingginya anggaran negara di sektor

pendidikan yang diamanatkan dalam undang-undang sebesar 20 persen belum mampu menjawab pendidik untuk semua anak bangsa. Masih ada remaja dan anak muda yang mengalami putus sekolah.

1) UKP

Usia Kawin Pertama (UKP) adalah Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan, oleh karena itu perkawinan ideal yang pada Usia Kawin Pertama dapat menjadi indikator saat dimulainya resiko kehamilan dan melahirkan.

Umur kawin pertama Perempuan yang kawin pertama pada usia muda mempunyai resiko terhadap kehamilan yang lebih lama daripada perempuan yang umur kawin pertamanya lebih tua. Melahirkan pada masa remaja, disertai kondisinya, merupakan indikator dasar yang menentukan kualitas hidup dan peranan perempuan di masyarakat. Adapun masalah utama fertilitas remaja, antara lain:

- Masalah indikator yang mengakibatkan angka kematian dan kesakitan ibu dan bayi tinggi.
- Masalah indikator ekonomi yang berkaitan dengan rendahnya indikator fertilitas dan kesempatan kerja
- c. Masalah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat.

Meskipun rata-rata UKP menunjukkan adanya penundaan usia menikah, namun perkawinan dini masih terus terjadi. Proporsi perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun tercatat masih sekitar 20 % pada tahun 2020 dan 2021. Angka perkawinan dini tersebut sangat perlu mendapat perhatian pada periode RPJMD 2021-2026. Dengan UU Perkawinan yang mensyaratkan usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki untuk dapat menikah, maka perkawinan dini masih akan terus terjadi. Usia minimal tersebut masih dalam kelompok usia sekolah tingkat menengah atas. Sehingga perkawinan yang terjadi pada usia tersebut akan berdampak indikator pada produktifitas remaja tersebut di masa depan akibat ia harus putus sekolah

untuk menikah. Bappenas dan UNICEF pada tahun 2014 mengestimasi bahwa perkawinan anak akan menimbulkan kerugian sebesar 1,7 % dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Penelitian juga telah banyak menemukan dampak indikator perkawinan usia dini terhadap indikator reproduksi, yaitu risiko tinggi pada kehamilan kelahiran perempuan usia muda, penyakit menular seksual, kanker serviks dan juga depresi. Baik dampak indikator ekonomi dan indikator dari perkawinan dini akan menimbulkan biaya besar bagi perekonomian dan tentunya akan mengurangi upaya optimasi bonus demografi.

Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara Usia Kawin Pertama (UKP) dengan fertilitas adalah indikator. Semakin muda UKP maka akan semakin indikator masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan.

Oleh karena itu usia perkawinan pertama juga dapat digunakan sebagai indikator awal seseorang berisiko hamil. Dengan demikian usia kawin pertama merupakan indikator demografi yang penting. Suatu masyarakat yang kebanyakan perempuannya melakukan perkawinan pertama pada usia muda, angka kelahirannya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang perempuannya melakukan perkawinan pertama pada usia lebih tua. Di Indonesia, perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian, mengetahui tren usia kawin pertama adalah sangat penting dalam mempelajari perubahan pola fertilitas di Indonesia.

Di Kota Ternate berdasarkan hasil estimasi Susenas 2017-2019 digunakan untuk mengestimasi kondisi di tahun 2020. Estimasi kondisi di tahun 2020 ini menggunakan metode proyeksi berdasarkan rata-rata trend dan kondisi tahun 2019 sebagai data dasarnya, sehingga pada tahun 2020, Usia Kawin Pertama (Median Usia Kawin Pertama) di Kota Ternate adalah sebesar 22 tahun sama dengan Hasil Pendataan Keluarga 2021 (BKKBN), yang berarti terjadi peningkatan sikap dan perilaku remaja terhadap Kesehatan

reproduksi karena Usia Kawin Pertama di Kota Ternate sebelumnya adalah 19 yang berarti bahwa masih terjadi perkawinan di usia sekolah.

Dampak dari terjadinya pernikahan anak ini selain berisiko pada indikator reproduksi perempuan karena alat-alat reproduksinya belum matang dan siap digunakan, juga berisiko meningkatkan angka kematian ibu dan juga angka kematian anak. Selain hal itu menurut hasil studi di 55 negara berpendapatan menengah dan rendah menunjukkan adanya hubungan antara usia ibu saat melahirkan dengan angka kejadian stunting. Makin muda ibu saat melahirkan, makin besar kemungkinan untuk melahirkan anak yang stunting (Finlay, Ozaltin and Canning, 2011). Kejadian stunting juga merupakan beban keluarga suatu negara di kemudian hari.

#### 2) ASFR

Age Specific Fertility Rate (ASFR) merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari usia subur menurut umurnya. Jadi ASFR, 15-49 tahun adalah banyaknya kelahiran tiap seribu kelahiran pada kelompok umur usia 15-49 tahun. Dengan melihat pola ASFR membentuk huruf U terbalik berarti Kelompok umur ini merupakan kelompok usia muda (remaja) yang berpotensi menunjukan tren yang meningkat. Sehingga perhatian terhadap angka fertilitas pada kelompok ini menjadi perhatian serius.

Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR) adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indicator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari usia subur menurut umurnya. Pola ASFR membentuk huruf U terbalik. Sedangkan Angka Kelahiran Remaja merupakan bagian kelompok umur Wanita Usia Subur 15 – 19 tahun, sehingga Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15-19 tahun) adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-19 tahun.

ASFR 15-19 tahun merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja program Bangga Kencana yang berguna disamping sebagai intervensi program pembangunan keluarga juga untuk pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

ASFR merupakan Tingkat fertilitas spesifik menurut umur perbandingan antara jumlah kelahiran hidup per 1.000 penduduk perempuan pada golongan umur tertentu pada usia reproduksi, untuk Kota Ternate sesuai dengan SUSENAS Tahun 2020 ASFR adalah sebesar 30,84 dan berdasarkan Hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 adalah sebesar 56,37 per WUS usia 15— 19 tahun, sedangkan 2025 diharapkan akan turun menjadi menjadi 24 per WUS usia 15—19 tahun.

## 3) Ketahanan Keluarga

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan Nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat menjadi sasaran utama dalam pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, sehingga diperlukan intervensi berbeda namun berkelanjutan.

Pembangunan keluarga merupakan salah satu tugas pokok BKKBN, selain kependudukan dan keluarga berencana. Visi BKKBN adalah membangun keluarga berkualitas sudah mencakup ketahanan keluarga. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, BKKBN berupaya mendorong keluarga di Indonesia menjadi keluarga tentram, mandiri dan bahagia. Hal ini berarti bahwa secara otomatis indeks pembangunan keluarga yang tinggi, keluarga yang tentram, mandiri, dan bahagia mempunyai ketahanan tinggi. Jadi keluarga berkualitas di dalamnya adalah keluarga yang punya ketahanan yang tinggi.

Adapun keluarga mandiri adalah memiliki aktivitas ekonomi yang mandiri. Misalnya, apakah pasangan tersebut berpendidikan atau tidak, mampu membiayai anak sekolah dan bisa ikut asuransi secara pribadi atau dibayari pemerintah. Sedangkan keluarga bahagia mencakup aspek pasangan suami istri sempat memanfaatkan waktu untuk berolahraga, piknik dan kegiatan yang termasuk kebutuhan tersier.

Secara garis keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan keluarga kecil dan berkualitas, untuk itu ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) dalam pengelolaan dan aktifitasnya perlu dimaksimalkan oleh para kaderTribina,

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), serta kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Tabet II 2 Kelompok Kegiatan Pembangunan Keluarga Di Kata Ternate Tahun 2021

POKTAN	JUMLAH	BERDASARAKAN KEPEMILIKAN SK PENGUKUHAN		JUMLAH KELUARGA SASARAN	KELUARGA ANGGOTA	
		ADA	TIDAK		JUMLAH	%
вкв	79	79		8.663	5.395	62,28
BKR	79	79		1.220	440	36,07
BKL	76	76	•	445	174	39,10
PIKR	53	53	•	43.090	3.256	7.56
UPPKA	43	43		2.366	118	4,99

Sumber: BKKBN, Pendataan Keluarga 2021

Implementasi ketahanan keluarga yang dikembangkan dalam program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahgiaan lahir dan batin.

Selanjutnya Indeks Pembangunan Keluarga atau disebut i-Bangga dimaksudkan untuk memotret dan mencarikan solusi terhadap permasalahan keluarga secara tepat. Karena keluarga itu menjadi unit analisis terkecil di dalam masyarakat yang perlu diketahui secara mikro. Jadi i-Bangga berbeda dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jika IPM memotret permasalahan secara makro, sedangkan iBangga ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan permasalahan dasar di dalam keluarga, sehingga bisa diupayakan penanganan masalah secara tepat.

Pengumpulkan data keluarga di seluruh Indonesia dengan menggunakan beberapa indikator untuk mengukur setiap permasalahan yang ada. Upaya identifikasi tersebut memberikan manfaat yang besar yang bisa diperoleh untuk benar-benar mengatasi permasalahan keluarga yang berpotensi menjadi permasalahan nasional secara tepat, yang

kemudian mendiagnosis secara mikro permasalahan masing-masing keluarga. Karena setiap keluarga memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Untuk itu, penanganan yang tepat terhadap setiap permasalahan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan bangsa secara komprehensif.

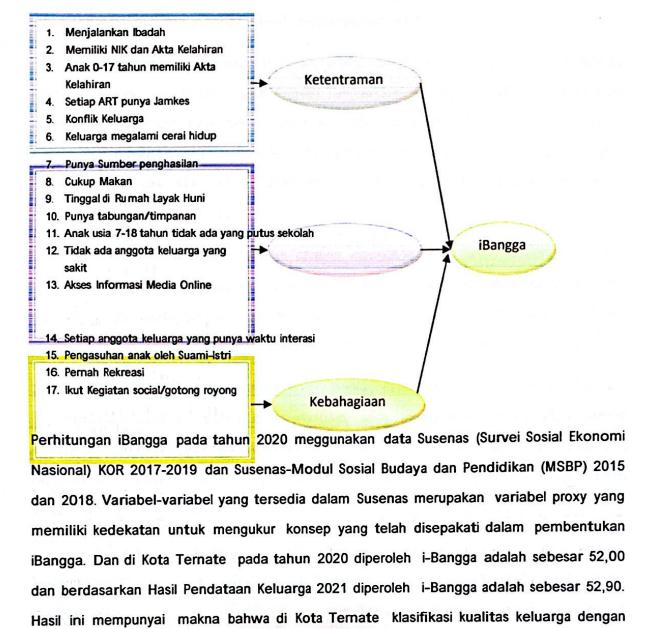
Jadi Indeks Pembangunan Keluarga atau disebut i-Bangga adalah Pengukuran perbandingan dari kualitas keluarga untuk semua wilayah di indonesia, serta mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga maju, berkembang atau rentan.

Indeks PembangunaanKeluarga (iBangga) telah dirumuskan menggunakan pendekatan tiga dimensi yang dibentuk dari 17 variabel. Tiga dimensi yang ditentukan mencakup:

- 1. Dimensi Ketentraman
- 2. Dimensi Kemandirian
- 3. Dimensi Kebahagiaan

Variabel masing-masing dimensi disajikan pada gambar 11.4 tentang kerangka alur pembentukan variabel.

Gambar II. 4 Kerangka Alur Pembentukan Variabel iBangga



# 4) Program Keluarga Harapan

prosentasi 52,90.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga

status pembangunan keluarga yang maju dan berkembang pada tahun 2021 berada pada

penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH.

Jadi PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamii. Program semacam ini secara internasional di kenal sebagai *Program Conditional Cash Transfers* atau Program Bantuan Tunai Bersyarat.

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Dalam jangka pendek program ini bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Sampai dengan tahun 2020 di Kota Ternate tetap fokus dalam memprioritaskan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat tidak mampu, karena program ini merupakan program nasional yang harus dilaksanakan. Untuk kegiatan PKH pada 2020 bervariatif untuk Kecamatan Batang dua sebanyak 249 orang, yang diperuntukan bagi SD sebanyak 153 siswa, SMP 94 siswa dan SMA 109 penerima. Disamping itu ada bantuan bagi wanita hamil sebanyak satu orang, apras 73 orang dan Lansia 48 orang, jadi yang terima hanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan, jumlah KPM pada 2020 berjumlah 2.325 jiwa dengan total bantuan yakni Rp 168.075.000,- yang diterima lewat Bank Rakyat Indonesia (BRI) sesuai masing - masing rekening.

#### D. Mobilitas Penduduk

Persebaran penduduk merupakan bentuk dari penyebaran penduduk di suatu wilayah, apakah merata atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari kepadatan penduduk yang merupakan angka jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi suatu wilayah negara. Jadi dalam hal persebaran penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terciptanya persebaran penduduk yang merata di seluruh Kecamatan di Kota Ternate. Hal ini terjadi mengingat Kota Ternate tidak memiliki wilayah yang begitu luas dan pusat-pusat aktivitas bisnis yang umumnya menjadi faktor bagi penduduk untuk menempati suatu wilayah juga tersebar hampir merata di seluruh Kecamatan. Terlebih, kondisi infrastruktur Kota Ternate juga sudah dalam kondisi yang baik sehingga sangat membantu untuk mengakses dari satu Kecamatan ke Kecamatan lain. Na mun, dalam jangka panjang, tetap perlu untuk membuat satu program untuk menata dan mengatur persebaran penduduk sehingga kondisi yang diinginkan yaitu terciptanya persebaran penduduk yang merata atau proporsional dapat dicapai. Dalam hal ini indikasi dari persebaran penduduk adalah melalui variabel kepadatan penduduk di Kota Ternate.

Disamping itu pengertian mobilitas penduduk adalah gerak atau perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam jangka waktu tertentu. Terdapat dua dimensi penting dalam menelaah mobilitas yaitu dimensi ruang atau daerah (spasial) yang diartikan sebagai perpindahan antar daerah, wilayah maupun negara. Sedangkan dimensi waktu yang dikatakan seseorang adalah migran jika tinggal di tempat yang baru atau berniat tinggal di tempat yang baru paling sedikit enam bulan lamanya. Pada umumnya mobilitas penduduk secara horizontal digolongkan menjadi dua yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non permanen.

Mobilitas permanen dapat diartikan mobilitas dengan tujuan untuk menetap atau disebut dengan migrasi. Sedangkan mobilitas non permanen merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain dengan tujuan tidak menetap yang disebut juga dengan istilah mobilitas sirkuler.

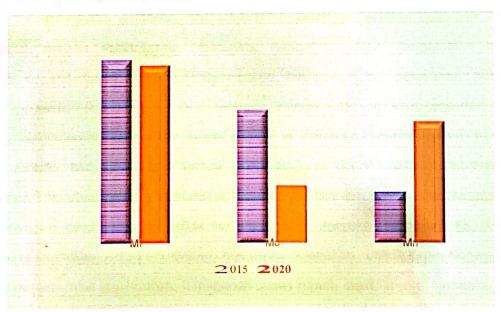
Di sisi lain untuk mobilitas, kondisi yang ingin dicapai adalah tidak terjadinya urbanisasi dari satu Kecamatan ke Kecamatan yang lain sehingga menciptakan konsentrasi penduduk di satu Kecamatan. Dalam mewujudkan hal tersebut perlu untuk mendekatkan fasilitas-fasilitas

pelayanan publik seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan ke penduduk di Kecamatan yang relative berada di pinggiran Kota. Selanjutnya, perlu untuk mendorong aktivitas ekonomi sesuai dengan potensi dan sumber daya di seluruh Kecamatan. Dalam formulasi mengukur migrasi penduduk, dapat diukur atas beberapa ukuran diantaranya angka mobilitas, angka migrasi masuk, angka migrasi keluar, dan migrasi netto.

Selanjutnya Angka Migrasi Netto adalah banyaknya migran netto (masuk dikurangi keluar) per 1.000 penduduk daerah tersebut. Dan Angka migrasi masuk adalah banyaknya migran masuk ke suatu daerah per 1.000 penduduk provinsi tersebut. Serta Angka Migrasi Keluar adalah banyaknya migran keluar dari suatu provinsi per 1.000 penduduk daerah tersebut.

Perkembangan net migrasi di Kota Ternate selama tahun 2015 – 2020 menunjukan tren yang meningkat yaitu dari 19.187 orang pada tahun 2015 dan naik menjadi 44.861 orang pada tahun 2020, ini menunjukan bahwa dengan berkembangnya sektor jasa dan pariwisata yang cukup pesat sehingga penduduk masuk (migrasi masuk) lebih besar dari penduduk keluar (migrasi keluar). Yaitu Migrasi Masuk adalah sebanyak 66.189 dan migrasi keluar adalah 21.328 orang pada tahun 2020.

Gambar II. 5 Perkembangan Migrasi di Kata Ternate



#### E. Data dan Informasi

Keterkaitan data dan informasi sangatlah erat sebagaimana hubungan antara sebab dan akibat. Bahwa data merupakan bentuk dasar dari sebuah informasi, sedangkan informasi merupakan elemen yang dihasilkan dari suatu bentuk pengolahan data. Untuk menuju pada pengertian Sistem Informasi secara utuh, diperlukan pemahaman yang tepat tentang konsep data dan informasi. Keterkaitan data dan informasi sangatlah erat sebagaimana hubungan antara sebab dan akibat. Bahwa data merupakan bentuk dasar dari sebuah informasi, sedangkan informasi merupakan elemen yang dihasilkan dari suatu bentuk pengolahan data.

Oleh karena itu dalam hubungannya dengan dinamika penduduk, maka Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Implementasikan dalam sebuah pelayanan administrasi kependudukan yang menghasilkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian dan Dokumen kependudukan lainnya.

Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diamanatan dalam UU. Nomor 23 Tahun 2006, adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain. Pada sisi lain, berbagai macam masalah yang ada dan dihadapi masyarakat yang menjadi hambatan dalam mengurus dokumen kependudukan perlu terus disuarakan melalui berbagai media sarana informasi yang dapat menjangkau masyarakat bawah, karena kenyataan yang ada masih ada sebagian kecil dari masyarakat hingga saat ini kurang menyadari pentingnya identitas kependudukan, mereka membuat KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta kematian, Akta Perkawinan, manakala diperlukan untuk kepentingan sekolah, melamar pekerjaan, naik haji/umroh, keringanan biaya rumah sakit, kredit, perbankan, daftar gaji, pensiun, asuransi kematian, maupun kepentingan lainnya, disadari ketika mereka sadar setelah terhambat segala urusan yang berhubungan dengan kepentingannya.

Pembaharuan tata kelola tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah kota/kabupaten, namun juga hingga ke tingkat desa. Ketersediaan data demografi desa yang akurat sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektifitas berbagai program pembangunan. Sebuah sistem informasi yang disebut sebagai Profil Desa kemudian diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah desa maupun pemerintah di atasnya. Sistem informasi Profil Desa tersebut menyediakan data dasar keluarga, data potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

Penerapan SIAK Relasi Kepemilikian Dokumen Kependudukan Melalui Jalin Lintas Sektor Online adalah merupakan suatu bentuk kerja sama dalam pemberian akses aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan kepada desa agar pihak desa dapat melihat data penduduk desanya dan juga menginput permohonan akta kelahiran dan akta kematian.

Pada aspek data dan informasi kependudukan, target yang ingin dicapai secara umum adalah terciptanya sistem adminitrasi kependudukan yang terintegrasi, mudah diakses, dan menjadi bagian dari penyusunan kebijakan yang berbasis pada fakta dan data. Sehingga, perlu disusun program untuk meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan menyempumakan sistem administrasi kependudukan tersebut serta mencapai target yang diinginkan.

Dalam rangka mewujudkan target tersebut perlu untuk membuat dan juga meningkatkan enam faktor, yaitu :

- 1. Regulasi dan Kebijakan
- 2. Kelembagaan
- 3. Sumber Daya Manusia (SDM)
- 4. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
- 5. Nomor Induk Kependudukan
- 6. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Disamping itu BKKBN dalam menjalankan tugas penyebarluasan informasi, juga memiliki aplikasi SIGA atau Sistem Informasi Keluarga, sebagaimana diamanatkan melalui Undang-

Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 diarahkan untuk dapat menghasilkan data dan informasi keluarga yang berkualitas. Sistem informasi ini telah dibangun dan diujicobakan pada 77 kabupaten dan kota sejak tahun 2019. Pengembangan New SIGA telah dilaksanakan selama 6 (enam) bulan mulai dari perancangan formulir, need assesment, uji publik, perancangan proses bisnis hingga pengembangan aplikasi. Pengembangan ini juga menjadi suatu kebutuhan mengingat adanya perubahan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RENSTRA 2020-2024 sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap formulir baik K/O maupun register untuk mengukur Indeks Kinerja Komponen (IKK) dan Indikator PRO PN; mengakomodir permintaan kebutuhan data dan informasi dari komponen operasional yang lebih kompleks; kebutuhan akan sistem informasi yang dapat melakukan integrasi data tidak hanya internal, namun juga integrasi eksternal; serta sebagai upaya perbaikan dalam merespon isu, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan data di lapangan termasuk tuntutan akan perbaikan fitur-fitur dalam aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi.

New SIGA, menjadi harapan baru dalam penyediaan data dan informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang valid, akurat, dan akuntabel. Harapan tersebut didasarkan pada prinsip kualitas dan akuntabilitas data dengan menerapkan pencatatan dan pelaporan By Name By Address, serta adanya integrasi antara sub sistem Pelayanan Kontrasepsi, Pengendalian Lapangan dan Pendataan Keluarga. Diharapkan dengan data yang dihasilkan dari New SIGA ini dapat memenuhi kebutuhan program termasuk mengukur capaian indikator kinerja pada RENSTRA BKKBN serta kebutuhan sistem informasi yang terintegrasi baik internal dan eksternal melalui penyempurnaan aplikasi dan dukungan infrastruktur.

Sejalan dengan Aplikasi New SIGA, juga terdapat Program Rumah Data dan Informasi Keluarga yang selanjutnya disingkat Rumah DataKu merupakan inovasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menggaungkan pembangunan berwawasan kependudukan. Disebut sebagai program inovasi karena Rumah DataKu menjadi pusat data dan informasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh pengambil kebijakan untuk (1) mengetahui kondisi, potensi, dan persoalan kependudukan, (2) mengambil langkah-langkah

strategis untuk menangani persoalan kependudukan yang ada. Dua hal penting tersebut sejatinya adalah upaya untuk mengarahkan agar pembangunan fokus pada penduduk, yakni dengan melihat kondisi dan potensi penduduk serta menjadikan penduduk sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Hal ini merupakan esensi pokok dari pembangunan berwawasan kependudukan.

Program Rumah DataKu memiliki empat tujuan penting, antara lain (1) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemangku kebijakan, (2) sebagai dasar untuk mengidentifikasikan permasalahan kependudukan, (3) menjadi basis data dalam proses perumusan kebijakan (evidence based policy), serta (4) menjadi salah satu instrumen dalam melihat potensi yang ada di suatu wilayah. Adapun tujuan pokok Rumah DataKu adalah menjadi sumber referensi data untuk mendukung analisis kependudukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna (BKKBN, 2020). Program Rumah DataKu juga memberikan kesempatan bagi penduduk untuk berpartisipasi dalam pembangunan, yakni sebagai pelaku (melalui informasi yang diberikan, terlibat dalam proses pendataan) dan sebagai penikmat (melalui intervensi pemerintah/non pemerintah terhadap hasil interpretasi data-data).

### BAB III. PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN

# A. Data Parameter Kependudukan Kata Ternate

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan dokumen startegis dalam pengintegrasian program kependudukan untuk jangka panjang yang wajib disusun oleh pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Presiden (Perpres) No 153 Tahun 2014 tentang GDPK, tanggal 17 Oktober 2014. Dimana secara substansi bahwa setiap Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Oleh karena itu pengintegrasian pembangunan kependudukan seluruh lintas sektor, baik yang secara langsung maupun stakeholder lainnya sudah harus menyadari bahwa dalam proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi dan sinergitas antara variabel demografi dengan variabel non demografi dalam pembangunan. Keberhasilan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) ini akan dilihat dari sejauh mana sasaran-sasaran dari indikator kependudukan tersebut dapat dicapai pada setiap periode waktu, seperti 1) Pengendalian Kuantitas Penduduk, LPP, TFR, NRR, CBR, CPR dan DR 2) Peningkatan Kualitas Penduduk, AKB, AKI, Life Expectancy, IPM 3) Pembangunan Keluarga, UKP, ASFR (15-19), i-Bangga, 4) Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk, Migrasi Masuk, Migrasi Keluar dan Net Migrasi, dan 5) Data dan Informasi Kependudukan, Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA), Rumah Data Dan Informasi Kependudukan (RDK) di Kampung KB, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) satu data Indonesia.

Tabel III 1. SASARAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA TERNATE TAHUN 2020-2026

NO	INDIKATOR -	TAHUN						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	KUANTITAS			Albandein				
	LPP (%)	0.96	0.57	0.55	0.42	0.32	0.24	0.18
	TFR	2.19	2.17	2.16	2.15	2.13	2.12	2.10
- T	NRR	1.32	1.26	1.19	1.13	1.06	1.02	1.00
	CBR	22.35	22.13	21.92	21.70	21.49	21.27	21.05
	GRR	1.07	1.06	1.05	1.05	1.04	1.03	1.03
	CPR	24.36	43.30	45.04	46.78	48.52	50.26	52.00
- 4	Unmet Need	33.30	29.44	25.58	21.72	17.86	14.41	14.00
	DR	45.84	45.47	45.10	44.74	44.37	44.2	44
2	KUALITAS							
	AKB	4	6	4	4	3	3	2
	AKI	20	16	15	14	14	13	12
	LIFE EXPECTANCY	70.97	71.06	71.25	71.44	71.62	71.81	72.00
	IPM	79.82	80.14	80.64	81.06	81.47	81.89	82.31
3	MOBILITAS	11.00		100			14 22 2	
	Mi	66,189	66,336	66,618	66,885	67,119	67,353	67,588
	Mo	21,328	47,750	47,953	48,145	48,313	48,482	48,651
9	Mn	44,861	18,586	18,665	18,740	18,805	18,871	18,937
4	PEMB. KELUARGA			KIRS .		7 6	1	
	UKP	22	22	22	22	22	22	22
	ASI-R (15-19)	30.84	56.37	49.90	43.42	36.95	30.47	24.00
	i-BANGGA	52.00	52.90	53.92	54.94	55.96	56.98	58.00
5	DATA & INFO DUK	9 (4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Pr-1 - 119	10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	3 Acc - 22	Establishment		
	PENGELOLAAN SIGA	The state of the s	To a security with with	The second second	T	T	To the second	I
	RDK PARIPURNA	T	- I	4	8	8	8	8
	SIAK Satu Data Indonesia	T				1 - 3		

### B. Analisis Potensi serta Dampak

Sebagaimana disadari bahwa pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Sehingga salah satu isu strategis yang perlu di kedepankan adalah isu pembangunan kependudukan. Dan ada tiga faktor demografi yang memengaruhi laju pertumbuhan penduduk yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi. Sehingga pembangunan kependudukan juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia agar pemerintah lebih mudah mewujudkan kesejahterahan dan pemerataan di berbagai sektor pembangunan sosial dan ekonomi.

Hal inilah yang menjadi alasan setiap daerah memerlukan suatu kerangka berfikir yang logis yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan kependudukan atau lebih lazim disebut Grand Gesign Pembangunan Kependudukan (GDPK). Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. GDPK ini terdiri dari lima pilar pembangunan kependudukan, yaitu: (1) Pengendalian Kuantitas Penduduk, (2) Peningkatan Kualitas Penduduk, (3) Pengarahan Mobilitas Penduduk, (4) Pembangunan Keluarga, (5) Pengembangan Data Base Kependudukan.

Dinamika kependudukan di Kota Ternate meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan yang lazim disebut sebagai indikator demografi. Penduduk merupakan sumberdaya yang potensial bagi proses pembangunan daerah jika dimanfaatkan secara optimal bagi pelaksanaan pembangunan, namun dapat pula menjadi beban jika tidak tertangani secara serius sehingga berimplikasi pada munculnya berbagai masalah sosial seiring dengan berkembangnya penduduk seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial dan sebagainya. Hal ini dikarenakan dalam proses pembangunan, penduduk berada

pada dua sisi sebagai subjek atau pelaku pembangunan, sekaligus menjadi objek atau sasaran pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang dirilis BPS Kota Ternate Tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk 205.001 jiwa dibandingkan tahun 2019 adalah sebesar 233,208 jiwa yang artinya terjadi penurunan sebesar -28.207 jiwa atau dengan laju pertumbuhan sebesar - 0,12 %. Begitu juga dengan tingkat kepadatan penduduk di Kota Ternate juga mengalami penurunan pada tahun 2019 rata-rata kepadatan penduduk sebesar 1.438 jiwa/Km2 menjadi 784,93 jiwa/Km2 atau turun dengan prosentase penurunan sebesar -0,28 %, sedangkan peningkatan jumlah penduduk terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 205.870 jiwa atau meningkat sebesar 869 jiwa (0,42 %). Kondisi ini menunjukan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk berdampak pada tingkat kepadatan penduduk.

Angka kelahiran total (Total Fertility Rate) menjadi sasaran strategis yang harus diperhatikan dari waktu ke waktu. Angka kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Melalui sasaran strategis ini, Kota Ternate memastikan membuat kegiatan-kegiatan strategis yang fokus pada pengendalian jumlah penduduk. Angka kelahiran total (TFR) merupakan perhitungan kelahiran untuk menentukan kelahiran yang terjadi pada anak dari jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia 15 sampai 49 tahun. TFR merupakan pengukuran sintetis yang menyatakan fertilitas pada akhir masa reproduksi dari suatu kohor hipotetis perempuan. TFR dihitung dengan cara menjumlahkan angka kelahiran menurut umur (ASFR) kemudian dikalikan dengan interval kelompok umur (biasanya lima tahun). Pada tahun 2020 di Kota Ternate TFR sebesar 3,46 perperempuan, yang berarti bahwa wanita usia 15-49 tahun di Kota Ternate secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa reproduksinya dan diharapkan akan menjadi 2,1 pada tahun 2026 atau turun dengan prosentase penurunan sebesar -3,95 %. Perolehan angka TFR ini cukup tinggi karena disebabkan oleh angka kelahiran pada kelompok umur (ASFR) yaitu pada WUS (20 - 24 tahun) masih tinggi. Hal ini dapat menjadi alasan karena Age Specific Fertility Rate (ASFR) merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Jadi ASFR, 15-49 tahun adalah banyaknya kelahiran tiap seribu wanita pada kelompok umur wanita usia 15-49 tahun. Dengan melihat

pola ASFR membentuk huruf U terbalik berarti Kelompok umur ini merupakan kelompok usia muda (remaja) yang berpotensi menunjukan tren yang meningkat. Sehingga perhatian terhadap angka fertilitas pada kelompok ini menjadi perhatian serius. Sedangkan Angka ASFR (15-19) adalah 30,84 kelahiran perW US usia 15-19 tahun pada tahun 2020 dan diharapkan dapat diturunkan sebesar 24 kelahiran perW US usia 15-19 tahun pada tahun 2026.

Net Reproduction Rate (NRR) merupakan salah satu hasil (output) proyeksi penduduk yang sering diinterpretasikan sebagai banyaknya anak perempuan yang dilahirkan oleh setiap perempuan dalam masa reproduksinya. Sering ditanyakan, kapankah Indonesia akan mencapai NRR=1, tingkat replacement level, yaitu saat dimana satu ibu diganti secara tepat oleh satu bayi perempuan. Dengan asumsi penurunan fertilitas dan mortalitas serta perolehan susunan umur seperti telah diuraikan di atas, Kota Temate akan itu bukan berarti laju mencapai setelah tahun 2026. Pada saat pertumbuhan penduduk sama dengan nol, atau penduduk tanpa pertumbuhan, tetapi penduduk akan tetap bertambah dengan laju pertumbuhan yang relatif stabil. Mengingat karena keterbatasan data pada SP 2021, maka baseline angka NRR merujuk pada hasil proyeksi SP2010, dimana Kota Ternate sampai dengan tahun 2020 angka NRR adalah 1,32 dan diharapkan akan menurun mengikutio tren TFR menjadi 1 pada tahun 2026 dengan asumsi terjadi peningkatan pemakaian kontrasepsi (CPR) yang akan berdampak pada penurunan TFR sehingga NRRpun dapat diturunkan menjadi NRR = 1.

Persentase wanita usia reproduksi yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) metode kontrasepsi pada titik tertentu dalam waktu, hampir selalu dilaporkan bagi perempuan menikah atau dalam hubungan seksual. Umumnya, ukuran mencakup semua metode kontrasepsi (modern dan tradisional), tetapi mungkin termasuk metode modern saja. CPR adalah prosentase wanita usia subur (15–49) tahun yang menggunakan metode kontrasepsi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksudkan dengan CPR (Tingkat kelangsungan pemakaian kontrasepsi) adalah perbandingan antara jumlah pemakai kontrasepsi terhadap wanita PUS (15–49 tahun). Baseline CPR tahun 2020 didasarkan padacapaian kinerja sebesar 24,36 % di Kota Ternate dan berdasarkan Hasil Pendataan Keluarga 2021 terjadi peningkatan menjadi 43,30 % dan diharapkan akan terus ditingkatkan

sampai menjadi 52 % pada tahun 2026, namun hasil tersebut memerlukan pengkajian mendalam karena dijumpai bahwa dengan CPR yang rendah maka TFR menjadi tinggi, hal ini sesuai dengan perhitungan secara demografis bahwa jika CPR rendah maka TFR menjadi tinggi dan sebaliknya jika TFR rendah maka CPR menjadi tinggi dengan catatan tidak ada faktor lain yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil ini selain faktor nilai anak dan faktor umur wanita usia kawin, juga telah ditemukan berbagai faktor yang secara tidak langsung mempengaruhi penurunan fertilitas seperti faktor ekonomi, sosial dan faktor lainnya sehingga dengan demikian dengan TFR yang tinggi sudah barang tentu mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk.

Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR), Menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 penduduk dalam suatu tahun tertentu. Angka ini diperoleh dengan membagi jumlah kelahiran yang terjadi selama 1 tahun (B) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun (P). CBR sebesar 22,35 pada tahun 2020 menunjukan bahwa dari 1000 penduduk terdapat 22–23 kelahiran hidup pada tahun 2020, dan diharapkan akan menu run pada tahun 2026 menjadi 21 kelahiran per 1000 wanita usia subur/WUS (15-49 tahun).

Komposisi dari populasi wanita yang kebutuhan kontrasepsinya tidak terpenuhi (unmet need) di Kota Ternate tahun 2020 berdasarkan hasil updating Data PK20 adalah sebesar 33,30 % serta estimasi Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) 2016-2019 juga memperlihatkan Hasil yang tak jauh berbeda yaitu 33,06. Sedangkan berdasarkan Hasil Pendataan Keluarga 2021 Unmet Need di Kota Ternate adalah sebesar 29,44 %. Hasil ini dapat dimaklumi dikerenakan Kota Ternate sebagai daerah dengan akses pelayanan sertajangkauan wilayah yang cukup memadai. Namun di wilayah ini juga memerlukan kerja keras dan perhatian khusus serta dukungan operasional yang tinggi, namun demikian tetap optimis untuk menurunkan kebutuhan kontrasepsinya tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 14 % pada tahun 2026. Disamping itu rendahnya intensitas pelayanan sebagai akibat pandemi covid 19, setiap sarana pelayanan harus mematuhi protokol kesehatan serta tingkat kekhawatiran yang berlebihan dari calon akseptor.

Selanjutnya Angka beban ketergantungan (depedency ratio) adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia nonproduktif. Dan di Kota Ternate tahun 2020 adalah 45,84. Perolehan angka beban ketergantungan sebesar 45,84 ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 45-46 penduduk usia non produktif. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Kota Ternate memiliki rasio ketergantungan dalam kategori Bonus demografi sedang berjalan dan secara teori sudah mulai menunjukan upaya dalam memajukan kesejahteraan masyarakatnya, karena beban tanggungan terhadap penduduk yang tidak produktif secara perlahan mulai di atasi. Namun belum berakibat pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun sampai dengan tahun 2026 diharapkan angka beban ketergantungan (depedency ratio) ini akan diturunkan sampai menjadi 44 sebagai batas ideal suatu daerah dalam memperkecil beban ketergantungan masyarakatnya yaitu dengan mempertajam pembangunan berwawasan kependudukan, dimana apakah menerapkan population responsive policy (kebijakan yang respon terhadap dinamika penduduk) atau population influacing policy (kebijakan yang mempengaruhi determinan dari dinamika penduduk).

Selanjutnya Infant Mortality Rate (IMR)/ Tingkat kematian bayi adalah banyaknya kematian bayi (sebelum umur satu tahun) yang terjadi pada kelahiran per 1000 bayi. Merupakan cara pengukuran yang dipergunakan khusus untuk menentukan tingkat kematian bayi. IMR biasanya dijadikan indikator dalam pengukuran kesejahteraan penduduk. Dari data di atas menunjukan bahwa di Kota Ternate setiap terjadi kelahiran per 1000 bayi, maka terdapat sebanyak 4 bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Dan diharapkan akan menurun menjadi 2 bayi pada tahun 2026. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama. Dan sampai dengan tahun 2020 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Ternate masih terdapat 20 kematian dan diharapkan pada tahun 2026 turun menjadi 12 kematian ibu. Dalam menentukan keberhasilan program kesehatan ibu dan anak, maka Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator penting yang

menentukan derajat kesehatan masyarakat. Karena untuk menganalisis kualitas penduduk di Kota Ternate juga harus didasarkan pada parameter-parameter kesehatan tersebut.

Angka Harapan Hidup pada saat lahir (e0) adalah hasil perhitungan proyeksi yang sering dipakai sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Dengan asumsi kecenderungan IMR menurun serta perubahan susunan umur penduduk seperti telah diuraikan di atas, maka harapan hidup penduduk Kota Ternate (laki-laki dan perempuan) adalah 70,97 tahun pada tahun 2020. Dan di harapkan akan naik menjadi menjadi 72 tahun pada tahun 2026.

Pengukuran reproduksi untuk menyatakan kemampuan perempuan dalam melahirkan anak perempuan untuk menggantikan system reproduksinya adalah Gross Reproduction Rate (GRR) dan Net Reproduction Rate (NRR). Dan perolehan Gross Reproduction Rate (GRR) di Kota Ternate sampai dengan tahun 2020 adalah 1,07 kelahiran bayi perempuan yang artinya bahwa rata-rata jumlah bayi perempuan yang akan dilahirkan pada suatu kohor perempuan selama usia reproduksi atau tingkat reproduksi bruto dari jumlah anak perempuan yang dilahirkan hidup per 1.000 penduduk perempuan dengan asumsi bahwa tidak ada bayi perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri usia reproduksi dan diharapkan sampai dengan tahun 2026 dapat diturunkan menjadi 1,03 kelahiran bayi perempuan. Sedangkan Angka Reproduksi Neto (Net Reproduction Rate - NRR) adalah jumlah anak perempuan yang dilahirkan per 1.000 penduduk perempuan dengan mempertimbangkan kemungkinan bayi tersebut meninggal dalam usia reproduksi. Dikatakan reproduksi neto karena ukuran ini telah mempertimbangkan kemungkinan meninggal. Dan di Kota Ternate pada tahun 2020, Angka Reproduksi Neto (Net Reproduction Rate - NRR) adalah sebesar 1,32 yang artinya bahwa setiap perempuan usia produktif rata-rata memiliki anak perempuan yang akan menggantikan system reproduksinya adalah 1-2 anak perempuan dan diharapkan akan dapat diturunkan menjadi 1 pada tahun 2026.

Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi. Dan Angka Migrasi

Netto adalah banyaknya migran netto (masuk dikurangi keluar) per 1.000 penduduk daerah tersebut. Didalam formulasi mengukur migrasi penduduk, dapat diukur atas beberapa ukuran diantaranya angka mobilitas, angka migrasi masuk, angka migrasi keluar, dan migrasi netto. Dan Angka migrasi masuk adalah banyaknya migran masuk ke suatu daerah per 1.000 penduduk provinsi tersebut. Serta Angka Migrasi Keluar adalah banyaknya migran keluar dari suatu provinsi per 1.000 penduduk daerah tersebut. Angka migrasi neto ini di Kota Ternate jumlah migrasi masuk pada tahun 2020 adalah 66.189 orang dan jumlah migrasi keluar adalah 21.328 orang dengan demikian berarti bahwa jumlah penduduk di Kota Ternate lebih banyak yang melakukan perjalanan masuk daripada keluar, hal ini sangat beralasan karena mulai terbuka sector jasa dan pariwisata di daerah ini. Namun demikian dari tren perkembangan tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa pada tahun 2026 jumlah migrasi keluar akan meningkat dan jumlah migrasi masuk akan menurun yaitu migrasi masuk berjumlah 67.588 dan migrasi keluar berjumlah 48.651 pada tahun 2026. Sedangkan migrasi net menunjukan perkembangan yang positif yang berarti bahwa ada terjadi pengembangan wilayah dan ekspansi pada sector-sektor tertentu.

Secara teori hubungan antara Usia Kawin Pertama (UKP) dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Oleh karena itu Pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, dimana pada batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapu kehidupan keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. PUP ini juga merupakan bagian dari Program Bangga Kencana yang diharapan dapat mendukung penurunan Total Fertility Rate (TFR). Tujuan Pendewasan Usia Perkawinan (PUP) diantaranya menunda perkawinan sampai batas usia minimal untuk siap berkeluarga, mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa, menunda kehamilan anak pertama bila telah terjadi perkawinan dini, sampai di usia 21 tahun. Pencegahan perkawinan anak ini memerlukan upaya terpadu dari berbagai pihak yang berperan, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga ke desa. Dan di Kota Ternate sampai dengan tahun 2020 UKP adalah sebesar 22 yang berarti bahwa median usia kawin pertama di Kota Ternate rata-

58

rata adalah berumur 22 tahun. Dan diharapkan akan tetap dipertahankan dan diharapkan tetap menjadi 22 pada tahun 2026.

Sejalan dengan UKP, maka fertilitas yang terjadi pada kelompok umur wanita usia subur atau disebut Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR) adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. Namun yang menjadi pembahasan pada sub bahasan ini hanya pada fertilitas wanita usia subur pada kelompok umu 15-19 tahun atau disebut sebagai kelahiran pada Remaja. Sehingga Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15-19 tahun) adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-19 tahun. Dan sampai dengan tahun 2020 Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15-19 tahun) di Kota Ternate adalah 30,84 kelahiran dan diharapkan akan dapat diturunkan pada tahun 2026 menjadi 24 Kelahiran Remaja (ASFR 15-19 tahun).

Indeks Pembangunan Keluarga atau disebut iBangga adalah Pengukuran perbandingan dari kualitas keluarga untuk semua wilayah di indonesia, serta mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga maju, bertembang atau rentan. Metode perhitungan i• Bangga berdasarkan Hasil Pendataan Keluarga 2021 (PK21), namun sampai dengan penyusunan Grand Design ini belum ada hasil i-Bangga berdasarkan perhitungan PK21, sehingga pengukuran varibel pembentukan iBangga didasarkan pada Susenas 2017-2019 untuk mengestimasi kondisi di tahun 2020. Estimasi kondisi di tahun 2020 ini menggunakan metode proyeksi berdasarkan rata-rata trend dan kondisi tahun 2019 sebagai data dasarnya. Hasil yang diperoleh 52,00 dan berdasarkan Hasil Pendataan keluarga 2021 diperoleh hasil iBangga adalah 52,90 dan diharapkan akan naik menjadi 58 pada tahun 2026.

Selanjutnya indikator Data dan Informasi Kependudukan, maka target untuk Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (New SIGA) adalah satu admin Kabupaten, Rumah Data Dan Informasi Kependudukan (RDK) di Kampung KB adalah 1 RDK Paripurna untuk Kampung KB Percontohan dan mendai 4 RDK Paripurna pada tahun 2022 dan diharapkan pada tahun 2026 bertambah emenjadi 8 RDK Paripurna dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk satu data Indonesia adalah 1.

#### BAB IV. VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

#### A. Visi

Terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan, tetapi juga dengan kondisi perkembangan sosial dan budaya masyarakat.

#### B. Misi

Misi dari Grand Design pembangunan kependudukan mencakup dua hal berikut: (a) Membangun komitmen para pemangku kepentingan dan penentu kebijakan (prime stakeholders) tentang penting dan strategisnya upaya pembangunan kependudukanbagi pembangunan berkelanjutan; (b) Membentuk atau menyempurnakan peraturan perundangundangan (regulasi) yang mendukung upaya pengendalian kuantitas penduduk.

#### C. Tujuan

Tujuan utama dari pembangunan kependudukan dapat dirumuskan sebagai berikut

- Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui rekayasa kondisi penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan, serta persebaran penduduk;
- b. Mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung lingkungan sesuai kearifan lokal melalui pengendalian angka fertilitas, penurunan angka mortalitas, dan pengarahan mobilitas penduduk.

#### D. Arah Kebijakan dan Strategi

#### Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan kependudukan diarahkan untuk penyerasian kebijakan pembangunan kependudukan dengan pembangunan di bidang sektor lainnya guna mempercepat terwujudnya penduduk tumbuh seimbang melalui peningkatan dan

sinergitas kebijakan pembangunan di daerah dengan kebijakan kependudukan. Untuk itu kebijakan pembangunan kependudukan ditekankan pada:

- Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas.
- Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB.
- 3. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja.
- Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB.

Penguatan Bidang BANGGA KENCANA melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program BANGGA KENCANA.

#### 2) Strategi

Di Provinsi Maluku Utara sampai ke Kabupaten/Kota, strategi pelaksanaan dari Grand Desain Pembangunan kependudukan ini meliputi:

- 1) Penyerasian dan penyusunan landasan hukum dan kebijakan pembangunan bidang BANGGA KENCANA yang sinergi dengan melakukan peninjauan kembali landasan hukum/ peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan bidang BANGGA KENCANA.
- Koordinasi terpadu antara pusat dan daerah, dan lintas sektor/kementerian/ lembaga terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang BANGGA KENCANA.

- 3) Analisis dampak kependudukan terhadap sektor lainnya, penelitian dan pengembangan pembangunan bidang BANGGA KENCANA, serta perumusan parameter pembangunan bidang BANGGA KENCANA sebagai rekomentasi dalam penyusunan dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang BANGGA KENCANA yang sinergi dengan pembangunan sektor lainnya.
- 4) Perumusan kebijakan pembangunan BANGGA KENCANA yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas, serta pembangunan yang berwawasan kependudukan (dinamika kependudukan) dan strategi pemanfaatan bonus demografi.
- Advokasi, sosialisasi, dan literasi, dan fasilitasi penyusunan kebijakan pembangunan
   BANGGA KENCANA kepada seluruh pemangku kebijakan.

#### E. Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan penyerasian kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan, program dan pokok-pokok kegiatan operasional yang akan dilakukan pada tahun 2020-2026 memerlukan penyesuaian di tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut :

#### 1. Program

#### a. PEMADUAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Program ini dilaksanakan untuk mengkaji berbagai kebijakan pembangunan khususnya kebijakan pembangunan yang belum sinergi dengan pemaduan pengendalian kependudukan baik yang dikeluarkan oleh instansi / lembaga yang ada dipusat maupun di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) agar dapat dipadukan dan diserasikan dengan kebijakan pengendalian penduduk pada tingkat daerah.

#### b. PERENCANAAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Program ini dilaksanakan dalam rangka tersedianya parameter kependudukan yang disepakati oleh lintas sektor terkait dan dijadikan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan sektor. Dengan ditetapkannya parameter kependudukan maka akan mudah menilai keberhasilan dari pelaksanaan program pembangunan.

#### c. KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

Program ini dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan komitmen lintas sektor dalam menanamkan dan membentuk sikap dan perilaku para stakeholder, mitra kerja dan masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

# d. ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN

Program ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya analisis dampak kependudukan dalam rangka penyerasian kebijakan pembaangunan berwawasan kependudukan

#### 2 Kegiatan

# a. PEMADUAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Pokok - pokok kegiatan yang akan dilaksanakan adalah meliputi :

- Pengintegrasian isu kependudukan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah khususnya pada tingkat Kota Ternate;
- Penyusunan dan pengembangan materi, kebijakan, dan bahan advokasi terkait Pembangunan Berwawasan Kependudukan pada tingkat Kota Ternate;
- Sosialisasi dan fasilitasi penyerasian kebijakan kepada stakeholder dan mitra kerja serta melakukan koordinasi yang intensif kepada mitra kerja terkait di Kota Ternate;

### b. PERENCANAAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Pokok -pokok kegiatan yang akan dilaksanakan adalah meliputi :

- Pengelolaan data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan sebagai basis perencanaan pembangunan di Kota Ternate;
- Penyusunan profil kependudukan dan pembangunan keluarga tingkat Kota
   Ternate;
- Pengembangan dan penyusunan parameter kependudukan dengan stakeholder dan mitra kerja di Kota Ternate;

#### c. KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

Pokok - pokok kegiatan yang akan dilaksanakan adalah meliputi :

- Pengembangan dan penyusunan kebijakan dan strategi pendidikan kependudukan dengan lintas sektor dan mitra kerja di Kota Ternate;
- Pengembangan dan penyusunan modul pendidikan kependudukan (jalur formal, non formal dan informal) di Kota Ternate;
- Kerjasama dan kemitraan dalam pelaksanaan pendidikan kependudukan di tingkat Kota Ternate.

#### d. Analisis dampak kependudukan

Pokok - pokok kegiatan yang akan dilaksanakan adalah meliputi :

- Perumusan isu strategis analisis dampak penduduk sesuai kondisi wilayah di Kota Ternate;
- Pengembangan kajian analisis dampak kependudukan terhadap aspek sosial, ekonomi, politik, hankam, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan di Kota Ternate;
- Penyiapan pembangunan sumber daya manusia dalam memanfaatkan bonus demografi di Kota Ternate.

#### BAB V. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

#### A. Gambaran Singkat Kata Ternate

Saat ini, Kota Ternate merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Maluku Utara yang memiliki luas wilayah Kota Ternate hanya 3,88% dari luas wilayah Provinsi Maluku Utara. Kota Ternate merupakan Kota Kepulauan dan merupakan salah satu simpul strategis sebagai pintu gerbang Provinsi Maluku Utara baik melalui jalur udara maupun laut. Jarak Kota Ternate ke Ibu Kota Sofifi adalah 21,10 Km.

Secara yuridis peningkatan status Kota Ternate dari kota Administratif Ternate menjadi Kotamdya Ternate didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 tentang pembentukan Kotamadya Ternate.

Pada awal pembentukan Kota Ternate terdiri dari 3 Kecamatan dengan 58 Desa/Kelurahan. Perkembangan dinamika pembangunan yang terjadi akibat interaksi secara sinergis antara Pemerintah Daerah dan masyarakat telah membawa dampak perubahan yang ditandai dengan perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang disamping pertimbangan rentang kendali pemerintahan, maka wilayah tertentu dimana perkembangannya dipandang memungkinkan untuk ditingkatkan status administrasinya seperti Pulau Moti, maka perlu ditempuh langkah kebijakan untuk direalisasikan terbentuknya Kota Ternate sebagai salah satu Kota di Maluku Utara.

Sesuai dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Moti, Kecamatan Moti yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pulau Ternate telah dimekarkan menjadi Kecamatan baru dengan 4 (empat) Desa yang ada di Pulau Moti dimekarkan dan ditingkatkan statusnya menjadi 6 (enam) Kelurahan. Perkembangan lain yang dicapai dari segi administrasi pemerintahan adalah dimekarkannya Pulau Batang Dua menjadi kecamatan yang memiliki 6 kelurahan.

Untuk melengkapi struktur pemerintahan Kota Ternate, maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Batang Dua. Selanjutnya

melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelurahan Mada dan Tafraka dalam Kecamatan Pulau Ternate, maka Kelurahan Togolobe mekar menjadi Kelurahan Mada dan Togolobe sedangkan Kelurahan Dorari Isa mekar menjadi Kelurahan Tafraka dan Dorari Isa. Kemudian melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang pembentukan kecamatan Pulau Hiri, Kelurahan Mada, Tafraka, Dorari Isa, Togolobe, Tomajiko, dan Faudu yang sebelumnya termasuk di Kecamatan Pulau Ternate dimekarkan menjadi kecamatan tersendiri yaitu Kecamatan Pulau Hiri.

Wilayah Kata Ternate dengan luas wilayah 5.709,72 km2 terdiri dari perairan 5.547,55 km2 dan daratan 162,17 km2, yang mencakup delapan kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Ternate 17,39 km2, Kecamatan Moti 24,78 km2, Kecamatan Batang Dua 29,03 km2, Kecamatan Hiri 6,69 km2, Kecamatan Ternate Barat 33,88 Km2, Kecamatan Ternate Selatan 20,22 km2, Kecamatan Ternate Tengah 13,26 km2, dan Kecamatan Ternate Utara 13,92 km2 serta Hutan Lindung 2,99 km2.

Secara astronomis, Kata Ternate terletak diantara 0o25'41,82"- 1021'21,78" Lintang Utara dan antara 12607'32,14" - 127026'23,12" Bujur Timur. Secara geografis Kota Ternate dibatasi oleh:

Sebelah Utara: Laut Maluku

Sebelah Selatan : Kata Tidore Kepulauan dan Kab. Halmahera Selatan

Sebelah Timur: Pulau Halmahera

Sebelah Barat : Laut Maluku dan Pulau Sulawesi

BAG. HUKUM SKPD

Tabet V. 1. Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kata Temate tahun 2020

	Kecamatan	Luas (km2)	Persentase (%)
	(1)	(2)	(3)
1.	Pulau Ternate	17,39	6,89
2.	Moti	24,78	15,28
3.	Pulau Batang Dua	29,03	17,90
4.	Pulau Hiri	6,69	4,12
5.	Ternate Barat	33,88	20,89
6.	Ternate Selatan	20,22	12,47
7.	Ternate Tengah	13,26	8,18
8.	Ternate Utara	13,92	10,44
	Kota Ternate	162,17	100,00

Sumber: BPS, Kata Ternate dalam Angka 2021

Tabet V. 2. Jumlah Penduduk don Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kata Ternate tahun 2016 – 2020

	Kecamatan	Jumlah Penduduk					
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pulau Ternate	16.892	17.233	8.720	8.914	8.735	
2	Moti	5.001	5.094	5.404	5.525	4.811	
3	Pulau Batang Dua	2.812	2.861	3.055	3.123	2.791	
4	Pulau Hiri	3.124	3.183	3.359	3.434	2.922	
5	Ternate Barat	-	-	9.326	9.534	8.788	
6	Ternate Selatan	75.019	76.794	78.300	80.046	74.329	
7	Ternate Tengah	61.839	63.385	63.960	65.403	53.643	
8	Ternate Utara	53.341	54.561	54.561	57.229	48.982	
	Kepulauan Sula	218.028	223.111	228.105	233.208	205.001	
	Pertumbuhan	2,34	2,35	2,24	2,21	0,96	
	Penduduk Penduduk						

Sumber: BPS, Kata Ternate dalam Angka 2017,2018,2019,2020 & 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk di Kota Ternate selalu meningkat pad a tahun 2016 hingga 2019, tetapi pada tahun 2020 jika berdasarkan data dari Kota Ternate dalam Angka mengalami penurunan.

Kota Ternate merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Maluku Utara yang memiliki berbagai sumber daya alam dan beranekaragam kebudayaan masyarakat yang cukup kental dan berkarakter kuat. Oleh karena itu, potensi-potensi tersebut merupakan salah satu modal berharga bagi setiap pelaksana pembangunan daerah untuk memulai rangkaian

program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Kesejahteraan rakyat akan terbangun secara konsisten dan merata jika segenap insan di Kota Ternate berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kemampuan dirinya untuk mandiri sekaligus membangun daya saing daerah, sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menggapai cita-citanya yakni meningkatnya taraf kehidupan keluarga secara sosial ekonomi dalam masyarakat.

#### B. Visi Kota Ternate

Sesuai dengan analisis isu-isu strategis pembangunan Kota Ternate, rencana pembangunan daerah memiliki fokus pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan wilayah secara berkesinambungan dan konsisten. Hal ini dikarenakan cukup banyaknya wilayah, terutama di Kecamatan-Kecamatan yang masih perlu perhatian lebih maksimal lagi, sehingga secara merata dapat dijangkau untuk menikmati hasil pembangunan daerah, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, perhatian penuh Pemerintah Kota Ternate bagi peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas wilayah menjadi salah satu pondasi utama dalam perumusan perencanaan pembangunan Kota Ternate 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Walikota dan Wakil Walikota Ternate periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 adalah:

#### "MEWUJUDKAN KOTA TERNATE YANG MANDIRI Dan BERKEADILAN"

#### - TERNATE ANDALAN -

Untuk mencapai Visi Kota Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan, maka dalam kurun waktu 5 tahun ke depan diperlukan kolaborasi berbagai instrumen lainnya sebagai modal pembangunan. Dukungan modal pembangunan dimaksud merupakan dimensi yang saling terkait antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh.

Dan untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian Visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

#### Ternate Mandiri

RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Ternate tahun 2005-2025. Oleh karena itu, pemaknaan Mandiri yang telah diuraikan dalam RPJPD tahun 2005-2025 menjadi penting untuk diperhatikan.

Dalam RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik ekonomi, hukum, politik, maupun sosial budaya.

Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif yang tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerah; untuk membangun Pemerintah Daerah yang mandiri mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui peningkatan daya saing; kemandirian aparatur Pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan pembiayaan pembangunan daerah yang makin kokoh; serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya.

Gambaran ini merangkum sebuah upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat kota Ternate yang menunjang proses pelayanan dan pembangunan infrastruktur fisik dan digital Kota Ternate, dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang ektraktif dan responsif, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan layanan publik yang berkesinambungan, dengan menumbuh-kembangkan lembaga social dalam bingkai 7 nilai dasar kebudayaan Ternate.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka kondisi Lebih Mandiri pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 akan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai investasi, dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD. Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

#### Ternate Berkeadilan

RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Ternate tahun 2005-2025. Oleh karena itu, pemaknaan Berkeadilan yang telah diuraikan dalam RPJPD tahun 2005-2025 menjadi penting untuk diperhatikan.

Dalam RPJPD Kota Ternate Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa berkeadilan dapat diartikan tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak kepada kebenaran dan sepatutnya tidak sewenang-wenang atau dengan definisi lain terkait dengan keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya tanpa dikurangi dan dilebihkan. Prinsip-prinsip keadilan berkaitan dengan akses kepada pengambilan keputusan dan 'basis necessities' (kebutuhan dasar) kehidupan. Pria dan wanita memiliki akses yang sama dalam perlindungan dan konsistensi perlindungan hukum, partisipasi pengambilan keputusan, penetapan prioritas dan proses alokasi sumber daya.

Supaya tercipta keadilan bagi masyarakat Kota Ternate, diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada semua baik yang miskin atau kaya, remaja atau lanjut usia (lansia), kelompok minoritas, ca cat, dengan akses yang sama terhadap penyediaan nutrisi, pendidikan, kesempatan kerja, perawatan kesehatan, perumahan, penyediaan air bersih, sanitasi dan lainelain pelayanan dasar.

Gambaran ini merangkum sebuah upaya membangun tanpa diskriminasi, setiap masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berekonomi, mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan hukum, serta mampu memberikan perlindungan

masyarakat yang kurang mampu dan memberikan ruang tumbuh kembangnya budaya masyarakat dengan memperhatikan sistem nilai dan norma sosial.

Dengan mengacu pada definisi di atas, maka kondisi akhir periode RPJMD tahun 2026 akan diukur dari indicator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang berkeadilan di akhir periode RPJMD.

#### C. Misi Kota Ternate

Secara umum, Misi dapat dirumuskan sebagai suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi, juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (the choosen track) bagi Pemerintah Kota Ternate, dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi para pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat dari setiap hasil pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD ini merumuskan 8 (delapan) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ke• delapan rumusan Misi pembangunan daerah jangka menengah Kota Ternate di tahun 2021• 2026, adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional.

Upaya pengembangan ekonomi daerah menjadi proses pembangunan yang memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan tepat sasaran serta bertujuan untuk membuka keterisolasian. Kota Ternate, hingga saat ini masih adanya pertumbuhan yang tidak seimbang karena masih adanya keterisolasian wilayah kepulauan dan konsentrasi sentra perdagangan hanya berada di pusat kota. Selain itu,

pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas, tingkat pengendalian inflasi yang masih belum berkualitas dan adanya potensi ekonomi kreatif yang belum diberdayakan.

Namun dalam beberapa kasus tujuan pembangunan yang demikian mulia, tidak dapat terealisasi secara optimal. Hasil pembangunan belum secara merata, adil dan transparan dapat menyentuh serta dinikmati oleh masyarakat secara proporsional. Hal ini terkait dengan adanya berbagai kendala, diantaranya kendala geografi, kendala transportasi, kendala budaya kerja dan etos kerja, kendala perencanaan dan penganggaran, serta kendala-kendala sosial lainnya.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan antar kawasan yang seimbang; meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengoptimalkan pengendalian laju inflasi, dengan sasaran terciptanya keseimbangan pertumbuhan antar wilayah; meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan optimalnya pengendalian inflasi.

#### 2. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif.

Tata kelola pemerintahan yang ekstraktif dan responsif menjadi bagian yang paling terpenting dalam mengarahkan kebijakan yang terintegritas. Selama ini, Kota Ternate masih belum mengoptimalkan intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, masih adanya budaya yang patrimonialisme dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan belum efektifnya pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja.

menghilangkan patrimonialisme dalam Misi ini bertujuan untuk budaya penyelenggaraan pemerintahan daerah; mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja; dan mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik; optimalnya implementasi manajemen ASN; meningkatnya akuntabilitas kinerja; optimalnya penerapan integritas; zona

meningkatnya akuntabilitas keuangan dan meningkatnya akuntabilitas pendapatan daerah.

3. Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Untuk mencapai Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan, maka salah satu hal yang harus diupayakan peningkatan pelayanan publik, termasuk pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Selama ini, kinerja birokrasi pelayanan publik dipengaruhi oleh budaya patrimonialisme yang masih kuat yang mendorong pejabat birokrasi untuk lebih berorentasi pada kekuasaan daripada pelayanan.

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ternate bersama dengan masyarakat perlu membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan SDM yang berkarakter dan religius.

Dalam hal pelayanan kesehatan upaya peningkatan kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi juga menjadi perhatian utama, antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian lbu, Bayi dan Balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Ternate akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat. Pemerintah Kota Ternate melalui Perangkat Daerah terkait, mengajak dan memberikan ruang partisipasi yang luas dengan tetap memegang prinsip dan ketentuan yang berlaku untuk dapat berperan aktif dalam pelayanan publik.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan sistem pengendalian internal dalam pelayanan publik, dengan sasaran optimalnya kualitas pelayanan publik (smart governance); meningkatnya mutu pendidikan Kota Ternate; optimalnya implementasi pendidikan karakter dan keagamaan, serta optimalnya capaian keluarga sehat.

4. Menumbuh-kembangkan Kelembagaan Sosial dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (Kie se Garn Magogugu Matiti Tomdi).

Kota Ternate sebagai kota yang heterogen, dari perbedaan agama, etnis dan budaya, akan melestarikan dan mempertahankan asset dan identitas kota, melalui menumbuh-kembangkan kelembagaan sosial dalam bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (Kie se Garn Magogugu Matiti Tomdi), yang terdiri dari: 1) Adat se Atorang; 2) Istiadat se Kabasarang; 3) Galib se Lakudi; 4) Cing se Cingare; 5) Bobaso se Rasai; 6) Ngale se Cara; dan 7) Sere se Duniru.

Hingga kini, Kota Ternate belum secara menyeluruh mengoptimalkan dan menumbuh-kembangkan Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya, dalam hal ini Kesultanan Ternate dengan lembaga sosial dan budaya lainnya. Kota Ternate juga menjadi anggota jejaring kota kreatif nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas ekonomi kreatif berbasis komunitas kepemudaan juga dapat memberikan kontribusi, apabila di kolaborasikan pada potensi kearifan lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Ternate berbasis lokal. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Dan jika ditelaah lebih jauh lagi, Kota Ternate harus tetap dapat merawat dan menjaga nilai-nilai kultur Ternate dalam interaksi sosial masyarakat dan lembaga.

Misi ini bertujuan untuk menyediakan lembaga dan informasi kearsipan sejarah, sosial dan budaya, dengan sasaran optimalnya peran lembaga sosial budaya – Kesultanan Ternate, meningkatnya intensitas event seni dan budaya yang diselenggarakan dan optimalnya pembinaan kepemudaan dan olahraga.

#### 5. Setiap Warga Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama dalam Berekonomi.

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi dalam jumlah yang memadai. Ketersediaan infrastruktur yang handal akan mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas perekonomian dan aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya. Dampak positif yang paling penting dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas adalah masuknya investor untuk berinvestasi di Kota Ternate, yang berdampak pada penurunan angka pengangguran dan adanya kesempatan berekonomi, sehingga upaya memberikan hak untuk masyarakat kota dalam berekonomi merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. maka pembangunan berbagai infrastruktur yang menunjang tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat dalam 5 (lima) tahun ke depan akan ditingkatkan dan disebar secara merata, adil dan proporsional.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan menyediakan sarana dan prasarana sektor informal, dengan sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tersedianya Sarana Prasarana Sektor Informal.

# 6. Setiap Warga Masyarakat Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan.

Pemerintah dan masyarakat Kota Ternate, secara saat ini dihadapkan pada pemenuhan layanan masyarakat. Konsitensi pelayanan sebagai norma dari sebuah kebijakan pemerintahan daerah. Semua warga Kota harus mendapatkan pelayanan yang efektif dan tepat sasaran sesuai dengan amanat undang-undang. Hingga kini, Kota Ternate dan belum optimalnya sarana dan prasarana untuk menunjang hak pelayanannya, mendapatkan pelayanan terhadap daya dukung lingkungan yang asri.

Lingkungan permukiman yang diimpikan oleh hampir semua masyarakat adalah lingkungan yang sehat dan nyaman untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan seharihari. Kondisi ini berbeda sekali dibandingkan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kota Ternate, khususnya yang tinggal di wilayah terdampak banjir yang diakibatkan drainase lingkungan yang kurang memadai dan tata kelola sampah perkotaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ternate mengemban misi ini sesuai dengan

75

porsi kewenangan, dan kemampuan anggarannya masing-masing. Upaya ini tidak hanya dilakukan di kawasan yang masuk area kumuh, tetapi juga pada area lain di luar area kumuh.

Misi ini bertujuan untuk memetakan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran optimalnya pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan serta masih tingginya kawasan permukiman kumuh; optimalnya tutupan lahan; optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; optimalnya cakupan layanan air bersih; optimalnya cakupan layanan sampah perkotaan; optimalnya penataan sistem drainase dan optimalnya layanan transporasi perkotaan.

#### 7. Daerah Melindungi Masyarakat yang Kurang Mampu.

Negara berkewajiban menyejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Kota Ternate hingga kini belum secara utuh mengoptimalisasi perlindungan hak bagi masyarakat yang kurang mampu, serta belum memaksimalkan pemetaan terhadap mitigasi kerawanan bencana alam hingga bencana non alam.

Misi ini bertujuan untuk melaksanakan tanggap darurat kerawanan bencana; melakukan pemetaan wilayah rawan bencana dan melakukan penanganan dan penanggulangan dampak Covid-19, dengan sasaran optimalnya tanggap darurat bencana serta koordinasi antar instansi terkait; optimalnya mitigasi, pemantauan resiko bencana dan penetapan sistem peringatan dini; optimalnya implementasi peraturan perundang-undangan kebencanaan dan kawasan rawan bencana; optimalnya ketahanan kota terhadap perubahan iklim; optimalnya penanganan Covid-19; optimalnya penanganan kemiskinan dan optimalnya pola konsumsi pangan masyarakat.

8. Daerah Memberikan Ruang untuk Tumbuh dan Berkembangnya Budaya Masyarakat dengan Memperhatikan Sistem Nilai dan Norma Sosial.

Sejatinya, Heterogenitas Kota menjadi nilai tersendiri jika dioptimalkannya norma masyarakat. Jika potenesi nilai tersebut terabaikan, maka potensi konflik akan menjadi masalah bagi penghidupan masyarakat kota ke depannya. Selain itu, Kota Ternate hingga kini belum mengoptimalkan secara efektif terkait dengan pengarustamaan gender, hak anak, dan kota ramah terhadap disabilitas.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga sosial dan budaya yang ada di Kota Ternate, dengan sasaran optimalnya pengelolaan potensi konflik sosial; optimalnya pengarustamaan gender dan hak anak dan optimalnya kota inklusif ramah disabilitas.

Misi pembangunan Kota Ternate bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kunci dari sebuah kesuksesan misi pembangunan ialah kolaborasi pada setiap PD. Selain itu, pentingnya konsep Pentahelix antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta stakeholder lainnya, yang bertujuan mendukung secara optimal program-program yang populis dan inklusif sebagai bentuk pembangunan kualitas SDM, dalam dimensi spasial, sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi di Kota Ternate.

#### D. Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Kata Ternate

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mewujudkan Visi Kota Ternate yang Mandiri dan Bekeadilan, uraian tujuan dan sasaran pada masingmasing misi adalah sebagai berikut:

# 1. Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional

Untuk mencapai target Misi 1 yaitu: "Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional", maka uraian tujuan sebagai implementasi dari isu strategis, maka dirumuskan sebagai berikut:

- a) Menciptakan Pertumbuhan Antar Kawasan yang Seimbang.
- b) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.
- c) Mengoptimalkan Pengendalian Laju Inflasi.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka uraian sasaran sebagai implementasi dari masalah daerah, maka dirumuskan sebagai berikut:

- a) Terciptanya Keseimbangan Pertumbuhan Antar Wilayah.
- b) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.
- c) Optimalnya Pengendalian Inflasi.

#### 2. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif

Untuk mencapai target Misi 2 yaitu: "Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif", maka uraian tujuan sebagai implementasi dari isu strategis, maka dirumuskan sebagai berikut:

- a) Menghilangkan Budaya Patrimonialisme dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b) Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berbasis Kinerja.

c) Mengoptimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka uraian sasaran sebagai implementasi dari masalah daerah, maka dirumuskan sebagai berikut:

- a) Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b) Optimalnya Implementasi Manajemen ASN.
- c) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.
- d) Optimalnya Penerapan Zona Integritas.
- e) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan.
- f) Meningkatnya Akuntabilitas Pendapatan Daerah.
- 3. Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Untuk mencapai target Misi 3 yaitu: "Meningkakan Kemampuan Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik yang Berkualitas", maka uraian tujuan sebagai implementasi dari isu strategis, maka dirumuskan sebagai berikut:

a) Meningkatkan Pengawasan dan Sistem Pengendalian Internal dalam Pelayanan Publik.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka uraian sasaran sebagai implementasi dari masalah daerah, maka dirumuskan sebagai berikut:

- a. Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik (Smart Governance).
- b. Meningkatnya Mutu Pendidikan Kota Ternate.
- c. Optimalnya Implementasi Pendidikan Karakter dan Keagamaan.
- d. Optimalnya Capaian Keluarga Sehat.
- 4. Menumbuh-kembangkan Kelembagaan Sosial dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (Kie se Garn Magogugu Matiti Tomdi)

Untuk mencapai target Misi 4 yaitu: "Menumbuh-kembangkan Kelembagaan Sosial dalam Bingkai 7 Nilai Kebudayaan Ternate (Kie se Garn Magogugu Matiti Tomdi)", maka uraian tujuan sebagai implementasi dari isu strategis, maka dirumuskan sebagai berikut:

- a) Menyediakan Lembaga dan Informasi Kearsipan Sejarah, Sosial dan Budaya

  Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka
  uraian sasaran sebagai implementasi dari masalah daerah, maka dirumuskan sebagai
  berikut:
- a) Optimalnya Peran Lembaga Sosial Budaya Kesultanan Ternate.
- b) Meningkatnya Intensitas Event Seni dan Budaya yang Diselenggarakan.
- c) Optimalnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga.
- 5. Setiap Warga Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama dalam Berekonomi

Untuk mencapai target Misi 5 yaitu: "Setiap Warga Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama dalam Berekonomi", maka uraian tujuan sebagai implementasi dari isu strategis, maka dirumuskan sebagai berikut:

- a) Menciptakan Lapangan Kerja.
- b) Menyediakan Sarana dan Prasarana Sektor Informal.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka uraian sasaran sebagai implementasi dari masalah daerah, maka dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
- 2. Tersedianya Sarana Prasarana Sektor Informal.
- 6. Setiap Warga Masyarakat Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan

Untuk mencapai target Misi 6 yaitu: "Setiap Warga Masyarakat Memiliki Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan",

maka uraian tujuan sebagai implementasi dari isu strategis, maka dirumuskan sebagai berikut:

a) Memetakan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka uraian sasaran sebagai implementasi dari masalah daerah, maka dirumuskan sebagai berikut:

- a) Optimalnya Pemenuhan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan serta Masih Tingginya Kawasan Permukiman Kumuh.
- b) Optimalnya Tutupan Lahan.
- c) Optimalnya Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- d) Optimalnya Cakupan Layanan Air Bersih.
- e) Optimalnya Cakupan Layanan Sampah Perkotaan.
- f) Optimalnya Penataan Sistem Drainase.
- g) Optimalnya Layanan Transporasi Perkotaan.

#### 7. Daerah Melindungi Masyarakat yang Kurang Mampu

Untuk mencapai target Misi 7 yaitu: "Daerah Melindungi Masyarakat yang Kurang Mampu", maka uraian tujuan sebagai implementasi dari isu strategis, maka dirumuskan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan Tanggap Darurat Kerawanan Bencana.
- b) Melakukan Pemetaan Wilayah Rawan Bencana.
- c) Melakukan Penanganan dan Penanggulangan Dampak Covid-19.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka uraian sasaran sebagai implementasi dari masalah daerah, maka dirumuskan sebagai berikut:

- a. Optimalnya Tanggap Darurat Bencana serta Koordinasi Antar Instansi Terkait.
- b. Optimalnya Mitigasi, Pemantauan Resiko Bencana dan Penetapan Sistem Peringatan Dini.

- c. Optimalnya Implementasi Peraturan Perundang-undangan Kebencanaan dan Kawasan Rawan Bencana.
- d. Optimalnya Ketahanan Kota terhadap Perubahan Iklim
- e. Optimalnya Penanganan Covid-19.
- f. Optimalnya Penanganan Kemiskinan.
- g. Optimalnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat.
- 8. Daerah Memberikan Ruang untuk Tumbuh dan Berkembangnya Budaya Masyarakat dengan Memperhatikan Sistem Nilai dan Norma Sosial

Untuk mencapai target Misi 8 yaitu: "Daerah Memberikan Ruang untuk Tumbuh dan Berkembangnya Budaya Masyarakat dengan Memperhatikan Sistem Nilai dan Norma Sosial", maka uraian tujuan sebagai implementasi dari isu strategis, maka dirumuskan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya yang ada di Kota Ternate.

  Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka uraian sasaran sebagai implementasi dari masalah daerah, maka dirumuskan sebagai berikut:
- a) Optimalnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial.
- b) Optimalnya Pengarustamaan Gender dan Hak Anak.
- c) Optimalnya Kota Inklusif Ramah Disabilitas.

Kerangka berpikir dalam rangka penyusunan RPJMD, yang menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan perlu dioptimalkan sampai dengan tahapan akhir program dan kegiatan, dapat digambarkan dalam piramida perencanaan RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026.

#### E. Pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate

Pembangunan nasional yang diarahkan pada pembangunan daerah, berdasarkan undang • undangnomor 32 tahun 2004 pada dasarnya adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan menambah kesejahteraan rakyat. Dimana diperlukannya pendayagunaan

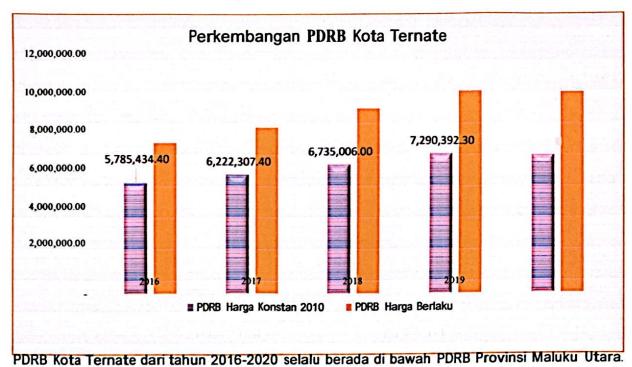
potensi daerah secara optimal dan benar. Sehingga semua daerah yang ada di Indonesia biasa ditingkatkan pembangunannya secara merata.dan yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan pembangunan suatu wilayah adalah dengan mengukurtingkat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Bila pertumbuhan dalam suatu wilayah mau berjalan dengan baik dan lancar, maka diperlukannya suatu indikator sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilannya.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk menciptakaan kesejahteraan. Dan untuk memicu laju pertumbuhan ekonomi regional serta meningkatkan kontribusinya terhadap pembentukan total Prociuk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka sebuah faktor unggulan dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan ekonomi

Sehingga dalam mendeskripsikan tentang kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate sebagai bagian dari pengukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi focus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial dengan indicator-indikator pengukuran mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Prociuk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan hasil pembangunan (yang merupakan salah satu unsur) kesejahteraan masyarakat adalah dengan menganalisis pertumbuhan PDRB. Dengan mengetahui pertumbuhan PDRB yang merupakan jumlah nilai tambah kegiatan perekonomian masyarakat akan dapat dipahami dinamika hasil perekonomian yang terjadi.

Tabet V. 3. Pertumbuhan Jumlah PDRB Kata Ternate 2016 – 2020 Berdasarkan Harga Konstan 2010 don Harga Berlaku



Hal tersebut merupakan hal yang wajar karena jumlah PDRB Provinsi Maluku Utara merupakan gabungan dari beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi. Oleh karena itu, laju pertumbuhan lebih tepat digunakan untuk mengkomparasikan pertumbuhan PDRB Kota Ternate dengan Provinsi Maluku Utara. Laju pertumbuhan PDRB Kota Ternate dari tahun 2016-2019 cenderung meningkat meskipun sempat menurun pada tahun 2017 menjadi 7,55 persen dari 7,99 % pada tahun 2016.

Nilai PDRB Kota Ternate atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 10,55 triliun. Secara nominal PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,1 triliun rupiah dari tahun 2019. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh Lapangan Usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan dari 7,29 triliun ripiah pada tahun 2019 menjadi 7,22 triliun pada tahun 2020. Hal ini menunjukan bahwa selama tahun 2020 Kota Ternate mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,09

%. Menurunnya laju pertumbuhan PDRB ini disebabkan oleh dampak dari wabah Covid 19 pada sebagian besar lapangan usaha.

#### BAB VI. PETA JALAN (ROAD MAP)

#### A. Penahapan implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan

Dalam memberi arah kebijakan, pedoman Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah pembangunan, sebagai rujukan dalam penyusunan roadmap dalam perencanaan pembangunan merupakan sejumlah ciri grand design yang telah berjalan selama ini. Sebagai sebuah rencana induk maka grand design merujuk pada dokumen pembangunan nasional serta memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta sasaran 5 tahunan (roadmap); rencana induk ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Sebagai kerangka utama maka grand design merupakan gambaran umum secara menyeluruh tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah serta dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dan keterkaitan antara kegiatan, subkegiatan dengan program• program yang telah ditetapkan.

Sela in dilatarbelakangi oleh kebutuhan terhadap kesamaan persepsi, suatu grand design juga diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah hal seperti kesenjangan tataran konsep maupun implementasinya, benturan antar peraturan, perbedaan pendapat, konflik kewenangan, multitafsir implementasi kebijakan. Guna mencapai tujuan tersebut serta posisinya yang menjadi acuan antar K/L dan pemerintah daerah maka grand design diharapkan pula menjadi bagian dari tata aturan pemerintahan baik nasional maupun daerah.

Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan rancangan induk pembangunan kependudukan yang diderivasi mengacu

kepada RPJPN yang sudah dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, untuk menjadi acuan K/L serta Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan kependudukan, kedudukan Grand Design Pembangunan Kependudukan pada hakikatnya dapat menjadi acuan untuk RPJMN atau RPJMD (mengingat telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden), dan penajaman dari RPJPN.

Gambar VI. 1 Keterkaitan Grand Design Kependudukan 2010 -2035 dengan Road Map



Roadmap Pembangunan Kependudukan akan selalu mengalami pemutakhiraan sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN/RPJMD (sehingga digambarkan dalam hubungan yang ulang-alik), Kependudukan periode sebelumnya, serta dinamika Roadmap Pembangunan kedudukan **GDPK** Pilar sebagai penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat apabila antar wilayah tidak mempunyai sebuah dokumen perencanaan pembangunan, keterkaitan maka tidak bisa disebut sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan.

Sejalan dengan Roadmap Pembangunan Kependudukan di atas, maka arah kebijakan tahunan RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

87

Tabet VI. 1 Arah Kebijakan Pembangunan Kata Ternate Tahun 2021-2025

	ARAH KEBIJAKA	AN PEMBANGUN	AN TAHUNAN		
2021	2022	2023	2024	2025	
Tahun 2021 pada dasa kesinambungan dari pelaksanaan program- dan mendorong	program sebelumnya	erdasarkan RTRW Ko	ota Ternate untuk mer	ngembangkan ekonomi wilayah berb	oasis po
fungsi-fungsi ruang	an daerah Tahun 2021 diti	ujukan untuk "Imple	mentasi 5	gkatan Kualitas Pelayanan	

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kota Ternate dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

#### B. Program Prioritas

Untuk melaksanakan penyerasian kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan, program dan pokok-pokok kegiatan operasional yang akan dilakukan pada tahun 2021-2026 memerlukan penyesuai di tingkat Kabupaten/Kota. Sehingga Indikator Program Bangga Kencana yang diharapkan terkonvergensi dengan Perencanaan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD adalah:

- 1) Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
- 2) Menurunnya angka kelahiran total
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
- 4) Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern
- 5) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan
- 6) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga
- 7) Menurunnya angka kelahiran remaja
- 8) Menurunnya angka prevalensi stunting pada balita
- 9) Meningkatnya pelayanan ramah lansia melalui 7 dimensi lansia tangguh
- 10) Meningkatnya pemahaman remaja tentang kespro dan gizi
- 11) Meningkatnya pemahaman keluarag tentang 1000 HPK
- 12) Tersedianya GDPK yang diimplementasikan sebagai dasar perencanaan
- 13) Pembentukan Rumah Data Paripurna di Kampung KB percontohan
- 14) Meningkatnya jumlah kampung KB mandiri
- 15) Meningkatnya sekolah formal/non formal yang melakukan pendidikan kependudukan
- 16) Meningkatnya PA MKJP
- 17) Meningkatnya KB Pascapersalinan
- 18) Meningkatnya faskes teregister yang mendapatkan ketersediaan alkon
- 19) Meningkatnya pembinaan faskes dalam pelayanan KB
- 20) Meningkatnya Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus
- 21)Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki Kelompok Kerja

  Bangga Kencana yang aktif melaksanakan advokasi kebijakan pembangunan kependudukan di daerah

22) Jumlah SDM dalam Program Bangga Kencana

#### BAB VII. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Peraturan Presiden 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan mencakup 5 pilar pembangunan di bidang kependudukan yaitu; Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas, Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, yang menjadi bagian integral dari Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar sehingga diperlukan koordinasi serta sinergi yang erat antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar merujuk pada dokumen pembangunan nasional yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta sasaran 5 tahunan (roadmap). Diharapkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan dapat memberikan arah kebijakan pelaksanaan selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan di bidang pembangunan kependudukan dan menjadi acuan Pemerintah Daerah serta sektor terkait dalam perencanaan pembangunan kependudukan.

#### B. Rekomendasi

Kependudukan merupakan permasalahan yang kompleks bagi Indonesia begitu juga di Kota Ternate, baik dari sisi kuantitas dan kualitas, dimana jumlah penduduk yang besar dengan daerah kepulauan dalam menjalankan permasalahan bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, persebaran penduduk dan pemerataan ekonomi. Pada akhirnya bukan hanya menggambarkan persoalan kependudukan, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan pembangunan yang multi dimensional. Sehingga disarankan kepada Pemda Kota Ternate dalam perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan isu-isu kependudukan kedalam RPJMD Kota Ternate.

91

# LAMPIRAN

02

SKPD	BAG. HUKUM				
	1				

Lampiran 1: PROGRAM DAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026

PROGRAM	Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Rencana Pembangunan Daerah khususnya pada tingkat Kota Temate;  Pengenduan Rependudukan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah khususnya pada tingkat Kota Temate;  aktif dala mengemb isu kependud Kota Ten dalam per	INDIKATOR	TAHUN					
		ar G	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kebijakan Pengendalian		pengintegrasian isu kependudukan dalam rencana pembangunan Kota Temate 2. Jumlah mitra  aktif dalam mengembangkan isu kependudukan di Kota Temate dalam penetapan parameter dan						
	Penyusunan pengembangan p materi, kebijakan yang terkait kebi Pembangunan bahan advokasi terkait Pembangunan Berwawasan Kependudukan pada tingkat Kota Temate;	materi,						
	Sosialisasi dan fasilitasi - penyeraslan kebijakan kepada stakeholder dan mitra kerja serta melakukan	1. Jumlah stakeholder yang melakukan sinkronisasi/ penyeraslan kebijakan pengendalian koordinasi yang intensi	f					

		kepada mitra kerja terkait;	melakukan sinkronisasi/ penyerasfan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.			
2	Perencanaan Pengendalian Penduduk	Pengelolaan data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan sebagai basis perencanaan pembangunan	Prosentase     pemanfaatan data     dan informasi     kependudukan     sebagai basis     perencanaan     pembangunan			
		Penyusunan profil kependudukan dan pembangunan keluarga tingkat Kota Temate	Jumlahprofil kependudukan tingkat Kota Temate     Jumlahprofil pembangunan keluarga tingkat Kota Temate			
		Pengembangan dan penyusunan parameter kependudukan dengan stakeholder dan	Jumlah stakeholder dalam pengembangan bahan informasi parameter kependudukan kerja dalam pengembangan bahan informasi parameter kependudukan			
3.	Kerjasama Pendidikan Kependudukan	Pengembangan dan penyusunan kebijakan dan strategi pendidikan kependudukan dengan lintas sektor dan mitra kerja	Jumlah mitra yang melaksanakan pendidikan kependudukan			

	Pengembangan dan penyusunan modul pendidikan kependudukan (jalur formal, non formal dan	Jumlah kerjasama     pengendalian     penduduk     Jumlah modul     yang disusun dan     dimanfaatkan      Jumlah tenaga     pengelola     pendidikan		
	Kerjasama dan kemitraan dalam pelaksanaan pendidikan kependudukan di tingkat Kota Temate	1. Jumlah kerjasama dengan organisasi keagamaan, organisasi sosial dan swadaya masyarakat yang berperan dalam program kependudukan  2. Jumlah implementasi kerjasama dengan organisasi keagamaan, organisasi sosial dan swadaya masyarakat dalam program kependudukan		
4. Analisis Dampak Kependudukan	Perurnusan isu strategis analisis dampak penduduk sesuai kondisi wilayah	Jumlah rumusan     isu strategis     analisa dampak     kependudukan      Jumlah mitrakerja     yang     merumuskan isu     strategis analisa     dampak     kependudukan		
	Pengembangan kajian analisis dampak kependudukan	Jumlah kajian     kependudukan     Jumlah mitrakerja     yang melakukan		

terhadap aspek sosial, ekonomi, politik, hankam, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan	kajian kependudukan 3. Jumlah aspek dominan dalam kajian analisis dampak kependudukan	
pembangunan sumber daya manusia dalam memanfaatkan bonus demografi di Kota Temate	1. Jumlah bahan advokasi (policy brief) dalam rangka kesiapan memasuki bonus demografi Kota Ternate 2. Jumlah stakeholder yang melakukan advokasi (policy brief) dalam rangka kesiapan memasuki bonus demografi Kota Ternate. 3. Jumlah mitra kerja yang melakukan advokasi (policy brief) dalam rangka kesiapan memasuki bonus demografi Kota	

Lampiran 2 : SK Wali Kota Ternate tentang Tim Koordinasi GDPK

WALIKOTA TERNATE

M. TAUHID SOLEMAN

SKPD BAG. HUKUM